



**EVALUASI KINERJA PERUM BULOG DALAM
PENGENDALIAN HARGA BERAS
(Studi Kasus di Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh
**Yuli Triadi
3353404042**

PERPUSTAKAAN
UNNES

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. S.T Sunarto, M.S
NIP. 132158718

Dr. Hj. Sucihatningsih, D.W.P, M.Si
NIP. 130515743

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Hj. Sucihatningsih, D.W.P, M.Si
NIP. 132158718

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Penguji Skripsi

Dra. Y. Titik Haryati, M.Si
NIP. 195206221976122001

Anggota I

Anggota II

Drs. S.T Sunarto, M.S
NIP. 132158718

Dr. Hj. Sucihatningsih, D.W.P, M.Si
NIP. 130515743

Mengetahui :

Dekan,

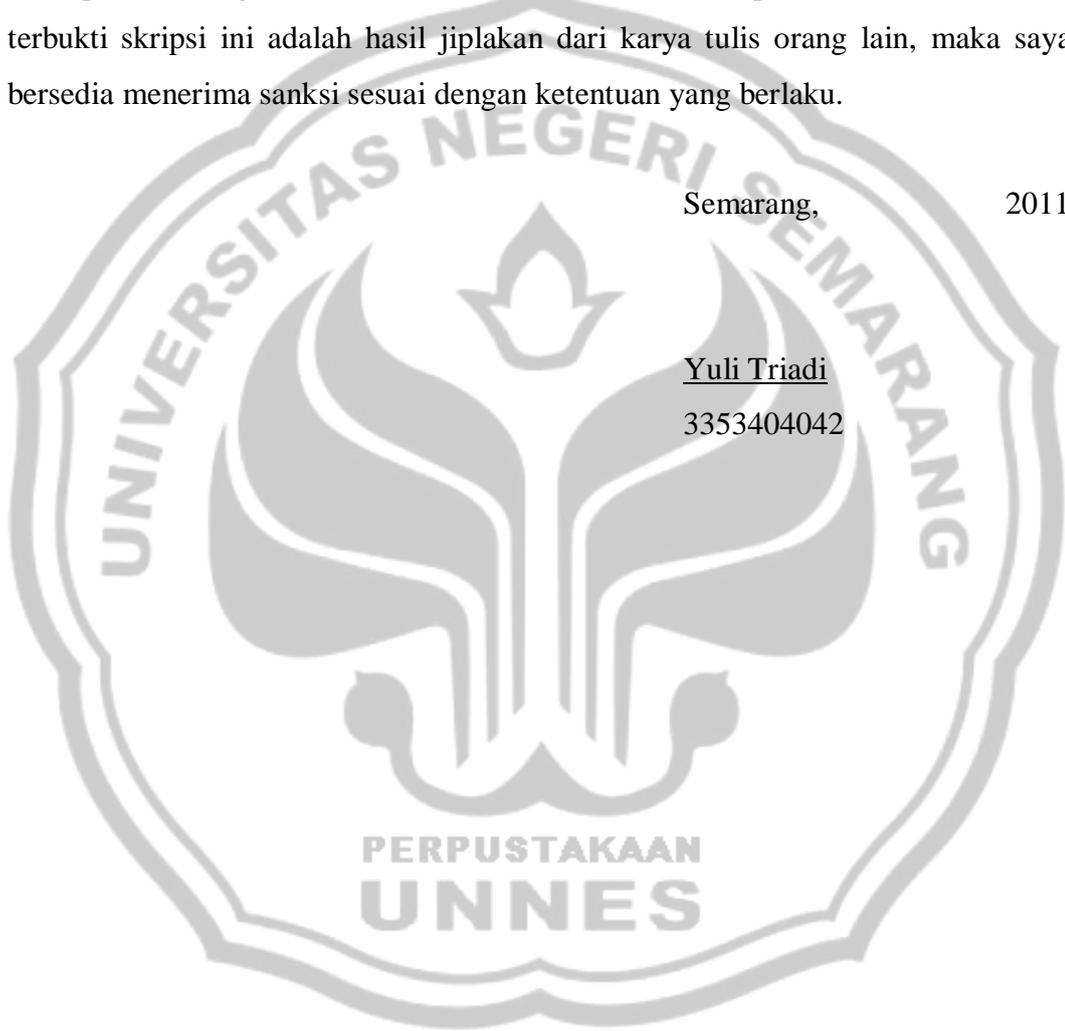
Drs. S.Martono, M.Si
NIP. 131813655

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 2011

Yuli Triadi
3353404042



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- "Hormatilah orang lain terlebih dahulu kalau kita ingin dihormati oleh orang lain"
- "Jangan terlalu menyesali kesalahan yang kita perbuat karena dengan melakukan kesalahan, kedepannya kita akan lebih baik dan berhati-hati dalam bertindak"
- "Cukuplah Allah yang menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung" (Al 'Imran : 173).

Persembahan :

PERPUSTAKAAN
Skripsi ini saya persembahkan untuk :

♥ Ibu tersayang

PRAKATA

Puji Syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Dampak Investasi Terhadap Pendapatan Masyarakat Dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Peneliti berkeyakinan dengan usaha yang keras dan bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak skripsi ini dapat tersusun, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmojo M.Si; Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan pengetahuan di Universitas Negeri Semarang
2. Drs. S. Martono, M.Si; Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Jurusan Ekonomi
3. Dr. Hj. Sucihatiningsih, D.W.P, M.Si; Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan dan Dosen pembimbing I atas bantuan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Dra. Y. Titik Haryati, M.Si, penguji utama yang telah mengoreksi skripsi hingga mendekati kebenaran.
5. Drs. S.T Sunarto, M.S pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dengan sabar dan ikhlas.
6. Kedua kakakku yang selalu mendukung dan mendorong dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan baik moril maupun materiil dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat sehingga dapat menambah pengetahuan bagi pembaca.

Semarang, 2011

Penulis



ABSTRAK

Yuli Triadi. 2011. *Evaluasi Kinerja Perum Bulog Dalam Pengendalian Harga Beras (Studi Kasus di Kabupaten Demak)*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Hj. Sucihatiningsih, M.Si, Pembimbing II Drs. S.T Sunarto, M.S.

Kata Kunci : Kinerja, Perum Bulog, Beras, Pengendalian harga, Operasi Pasar, dan Raskin.

Tugas Bulog adalah menjaga kestabilan harga beras. Pada tahun 2010 harga beras di Kabupaten Demak menjadi tinggi karena mengalami peningkatan. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi melihat lahan pertanian padi yang luas dan berpotensi menghasilkan panen yang melimpah dan membuat harga gabah dan padi murah. Permasalahan dalam penelitian ini : faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan harga beras di Kabupaten Demak tahun 2010. Langkah-langkah apa saja yang ditempuh Bulog untuk mengatasi kenaikan harga Beras di Kabupaten Demak. Bagaimana efektivitas langkah-langkah yang ditempuh Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras di Kabupaten Demak. Apa saja yang menjadi kendala Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras di Kabupaten Demak.

Subyek dalam penelitian ini adalah Perum Bulog di Kabupaten Demak tahun 2010. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dengan karyawan Perum Bulog untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras, langkah yang diambil Perum Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras, dan kendala-kendala yang dialami Perum Bulog dalam mengatasi harga beras. Wawancara dengan petani di Kabupaten Demak untuk mengetahui berapa panen yang diperoleh setiap kali panen dan apa saja yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas gabah yang dipanen dan beras yang dihasilkan, serta dengan masyarakat untuk mengetahui keefektifan kebijakan yang ditempuh Perum Bulog. Studi dokumen dilakukan di Perum Bulog dan BPS untuk mengetahui seluk beluk tentang Perum Bulog, mengetahui kondisi pertanian di Kabupaten Demak. Metode analisis data yang digunakan menggunakan analisis diskriptif.

Hasil penelitian diketahui bahwa yang menyebabkan kenaikan harga beras adalah kualitas dan kuantitas beras dipengaruhi oleh cuaca serta jenis dan cara penggunaan pupuk, kenaikan harga pokok pembelian pemerintah (HPP), terlambatnya penyaluran raskin, spekulasi kenaikan harga, Ramadhan, kenaikan biaya produksi beras. Langkah untuk mengatasinya Bulog mengadakan operasi pasar dan menyalurkan raskin tiap bulan untuk menambal suplai beras di pasaran. OP dan raskin merupakan langkah yang efektif dalam pengendalian harga beras. Kendalanya keterbatasan angkutan saat penyaluran raskin, kekurangtertiban dalam melakukan pembayaran.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada tahun 2010 di Kabupaten Demak mengalami perubahan cuaca yang mengakibatkan terjadinya hujan deras dan berdampak terjadinya banjir di sejumlah areal pertanian pertanian dan memicu

serangan hama wereng dan tikus, hal itu menyebabkan kualitas dan kuantitas gabah yang dipanen dan beras yang dihasilkan menurun. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor meningkatnya harga beras di Kabupaten Demak. Strategi Perum Bulog dalam menjadi kestabilan harga beras dengan cara menggelar operasi pasar dan menyalurkan raskin.

Saran yang dapat diberikan adalah Menjaga atau mempererat koordinasi antara Bulog dengan Pemda Kabupaten Demak dan pihak penyedia jasa angkutan, agar ketika tiba penyaluran raskin dan perlunya diadakan OP, pihak Bulog bisa dengan segera menyediakan beras yang dibutuhkan, dan jasa angkutan menyediakan kendaraannya. Diperlukannya kerjasama antara Bulog dan Pemda Kabupaten Demak untuk melakukan sosialisasi mengenai penanaman padi yang lebih baik, agar hasilnya berkualitas dan banyak jumlah panennya. Bulog perlu sikap tegas kepada Pemda Kabupaten Demak dalam hal pembayaran raskin oleh perangkat-perangkat desa, karena bila pembayaran raskin selalu terlambat, akan merugikan atau membebani karyawan Bulog setiap akhir tahun. Bulog perlu memberi perhatian yang lebih pada kendala-kendala dalam menjalankan OP dan penyaluran raskin, karena bagaimanapun kendala tersebut membuat repot beberapa pihak seperti karyawan Bulog sendiri, perangkat desa, penerima beras OP dan raskin.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II. LANDASAN TEORI	
2.1 Ketahanan Pangan	9
2.1.1 Tujuan dan sasaran ketahanan pangan.....	10
2.1.2 Faktor yang menentukan Ketahanan Pangan	10
2.2 Harga.....	14
2.2.1 Definisi Harga.....	14
2.2.2 Tujuan Penetapan Harga	15
2.2.3 Strategi Penetapan Harga	18
2.2.4 Faktor yang mempengaruhi peninjauan kembali Strategi Penetapan Harga	18
2.3 Kinerja.....	19
2.4 Perum Bulog.....	24
2.4.1 Tugas dan Peran Perum Bulog.....	24
2.4.2 Alur Pengadaan.....	25
2.5 Kerangka Berpikir	28
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian.....	29
3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	29
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4.1 Interview/Wawancara.....	32
3.4.2 Studi Dokumen.....	33
3.5 Teknik Analisa Data	33
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

4.1 Hasil Penelitian	35
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Demak.....	35
4.1.2 Gambaran Umum Perum Bulog.....	36
4.1.3 Tugas Bulog terkait pengendalian harga beras.....	43
4.1.3.1 Operasi Pasar.....	43
4.1.3.2 Raskin.....	47
4.1.4 Hasil Wawancara dengan Pimpinan dan Karyawan Perum Bulog Sub Divre I Semarang Tentang Pertanian di Kabupaten Demak.....	54
4.1.5 Kondisi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak.....	61
4.1.6 Faktor-Faktor yang menyebabkan Kenaikkan Harga Beras di Kabupaten Demak.....	62
4.1.6.1 Kualitas dan Kuantitas Beras.....	62
4.1.6.2 Psikologis.....	63
4.1.7 Langkah-Langkah Yang Ditempuh Bulog Dalam Mengatasi Kenaikan Harga Beras di Kabupaten Demak.....	66
4.1.7.1 Operasi Pasar (OP).....	66
4.1.7.2 Raskin.....	66
4.1.8 Efektivitas Langkah-Langkah Yang Ditempuh Bulog Mengatasi Kenaikan Harga Beras di Kabupaten Demak.....	67
4.1.8.1 Operasi Pasar.....	67
4.1.8.2 Raskin.....	68
4.1.9 Kendala Bulog Dalam Mengatasi Kenaikan Harga Beras di Kabupaten Demak.....	68
4.1.9.1 Opearasi Pasar.....	68
4.1.9.2 Raskin.....	69
4.2 Pembahasan.....	72
4.2.1 Temuan Penting Terkait Dengan Penelitian Evaluasi Kinerja Perum Bulog Dalam Pengendalian Harga Beras (Studi Kasus di Kabupaten Demak).....	72
 BAB V. PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	75
5.2 Saran.....	76

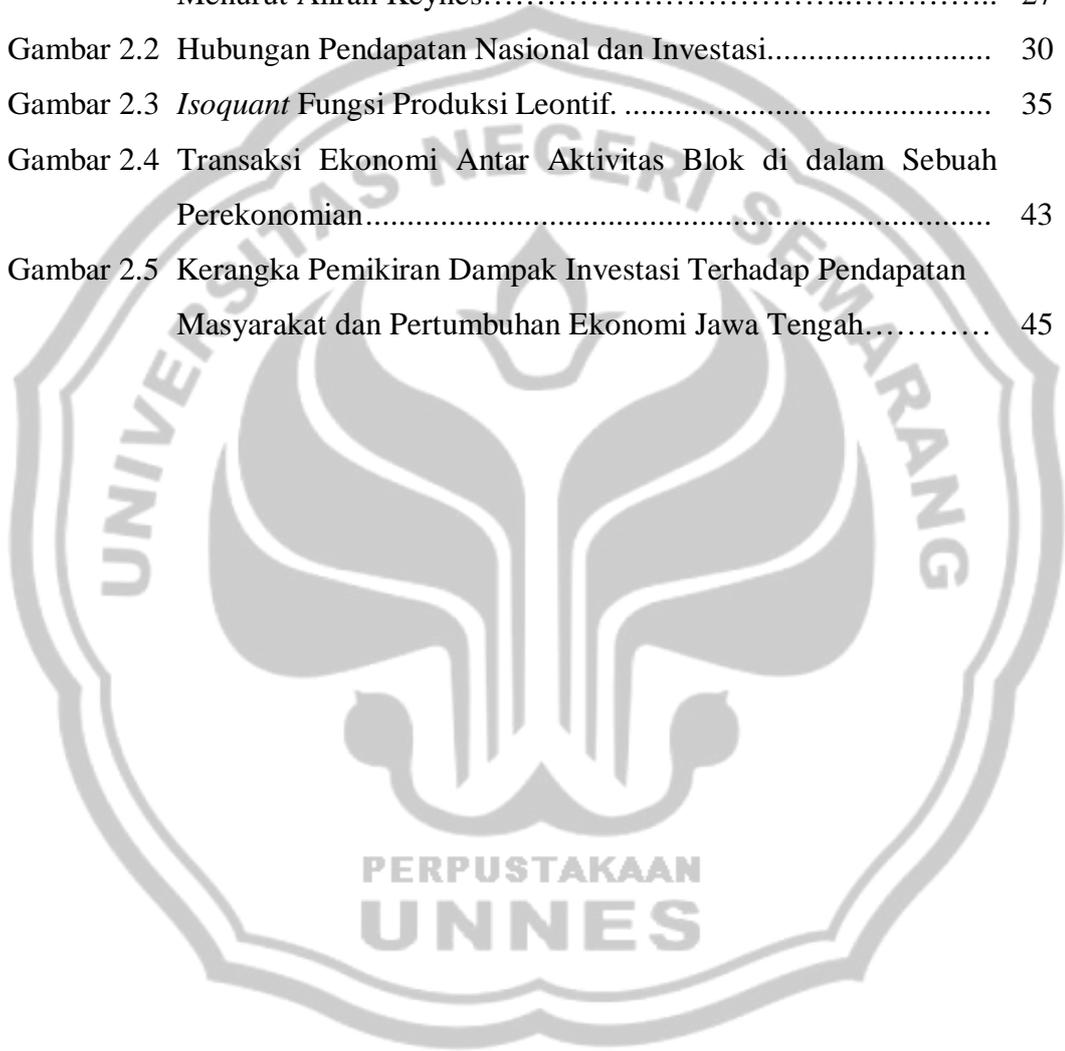
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Indikator Ekonomi Jawa Tengah.....	5
Tabel 1.2 Realisasi Nilai Investasi PMA/PMDN Jawa Tengah	6
Tabel 1.3 Penduduk Miskin Jawa Tengah.....	7
Tabel 1.4 Pendapatan Disposabel Per Kapita Menurut Golongan Rumah Tangga Di Jawa Tengah, 2004.....	7
Tabel 2.1 Tabel Neraca SNSE 2004	41
Tabel 3.1 Tabel Matrik Pengumpulan Data.....	52
Tabel 3.2 Tabel Matrik Analisis Data.....	52
Tabel 4.2 Pendapatan Per Kapita Penduduk Jawa Tengah	60
Tabel 4.3 Indikator Ekonomi Jawa Tengah Tahun 200-2007	61
Tabel 4.4 Struktur Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2006-2007 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Persen)	63
Tabel 4.5 Perkembangan Investasi Jawa Tengah Tahun 2007 Sesuai Bidang Usaha	64
Tabel 4.6 Perkembangan Investasi Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Berdasarkan Agregasi Sistem Neraca Sosial Ekonomi 2004.....	66
Tabel 4.7 Dampak Investasi Tahun 2007.....	68
Tabel 4.8 Dampak Investasi Tahun 2007.....	71
Tabel 4.9 Perbandingan Dampak Dari Simulasi.....	74
Tabel 4.10 Perbandingan Dampak Pendapatan Masyarakat	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Hubungan Investasi, Tabungan, Dengan Tingkat Bunga Menurut Aliran Keynes.....	27
Gambar 2.2 Hubungan Pendapatan Nasional dan Investasi.....	30
Gambar 2.3 <i>Isoquant</i> Fungsi Produksi Leontif.	35
Gambar 2.4 Transaksi Ekonomi Antar Aktivitas Blok di dalam Sebuah Perekonomian.....	43
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran Dampak Investasi Terhadap Pendapatan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Tabel 4.1 Kependudukan Didasarkan Pada Kabupaten Dan Kota Tahun 2007.....	79
2. SNSE Jawa Tengah 2004 Agregasi 23 x 23.....	80
3. Perkembangan Investasi Jawa Tengah 2004-2007.....	81
4. Tabel SNSE 2004.....	82
5. Hasil Simulasi Dampak Investasi.....	93
6. Permohonan Ijin Observasi ke BPM Semarang.....	94
7. Permohonan Ijin Penelitian ke BPM Semarang.....	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beras memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dipandang dari aspek ekonomi, tenaga kerja, lingkungan hidup, sosial, budaya dan politik. Masalah beras bukan hal yang sederhana dan sangat sensitif sehingga penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Kesalahan yang dilakukan dalam kebijaksanaan perberasan akan berdampak tidak saja pada kondisi perberasan nasional tetapi juga pada berbagai bidang lain yang terkait. Seperti bila terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan harga beras melambung, bila tidak cepat diatasi akan berdampak pada naiknya harga-harga barang atau jasa yang lain. Oleh sebab itu dalam sejarah perberasan di Indonesia tidak pernah lepas dari peranan pemerintah yang secara sengaja turut serta dalam mengatur ekonomi perberasan nasional. Campur tangan pemerintah terlihat dengan dibuatnya INPRES No. 7 Tahun 2009 tentang kebijakan perberasan yang menetapkan harga pembelian beras dalam negeri sebesar Rp. 5.060,00/kg. Peranan beras yang sangat khusus merupakan salah satu alasan penting campur tangan pemerintah terhadap perberasan masih dilakukan.

Kadar campur tangan pemerintah dapat berubah setiap saat karena perubahan peranan unsur-unsur di atas. Namun melepaskan sama sekali campur tangan pemerintah dalam perberasan nasional belum pernah dilakukan karena

resikonya sangat besar. Resiko paling membahayakan terjadinya inflasi yang disebabkan naiknya harga beras dan terjadinya kelaparan/kekurangan gizi. Secara partial berbagai perubahan instrumen kebijakan pernah dilakukan pemerintah, seperti perubahan INPRES No.8 Tahun 2008 ke INPRES No.7 Tahun 2009, salah satu yang berubah mengenai harga pembelian beras dalam negeri dari Rp 4.600,00 ke Rp 5.060,00. Akan tetapi pemerintah belum pernah merubah secara mendasar tujuan kebijakan perberasan nasional yang dilakukan selama ini yang masih tetap berkisar pada menjaga kelangsungan produksi beras domestik, melindungi petani padi serta menjamin kecukupan beras bagi masyarakat agar mereka mendapatkan akses yang mudah secara ekonomi maupun fisik secara berkelanjutan.

Campur tangan pemerintah dalam ekonomi perberasan antara lain dilakukan melalui lembaga pangan yang bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perberasan baik yang menyangkut aspek pra produksi, proses produksi, serta pasca produksi. Salah satu lembaga pangan yang diberi tugas pemerintah untuk menangani masalah pasca produksi, khususnya dalam bidang harga, pemasaran dan distribusi adalah Badan Urusan Logistik (Bulog). Lembaga seperti Bulog telah ada sejak zaman sebelum penjajahan Belanda, saat penjajahan Belanda yang dikenal sebagai (Voedings Middelen Fonds) VMF, masa penjajahan Jepang yang dikenal sebagai Sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisha, atau juga pada zaman kemerdekaan yang banyak mengalami perubahan sejak dari (Pengawasan Makanan Rakyat) PMR, (Yayasan Bahan Makanan) BAMA, (Yayasan Urusan Bahan Makanan) YUBM, (Badan Pelaksana Urusan Pangan) BPUP, Kolognas dan Bulog. Tugas dan fungsi

lembaga pangan tersebut umumnya berkisar pada masalah pengendalian harga, distribusi dan pemasaran. Hanya fokus utamanya dapat berbeda antar waktu dan antar lembaga tersebut.

Bulog adalah lembaga pemerintah yang dibentuk pada tahun 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967, yang ditugaskan pemerintah untuk mengendalikan stabilitas harga dan penyediaan bahan pokok, terutama pada tingkat konsumen. Peran Bulog tersebut dikembangkan lagi dengan ditambah mengendalikan harga produsen melalui instrumen harga dasar untuk melindungi petani padi. Dalam perkembangan selanjutnya, peran Bulog tidak hanya terbatas pada beras saja tetapi juga pada pengendalian harga dan penyediaan komoditas lain seperti gula pasir, tepung terigu, kedele dan pakan ternak, minyak goreng, telur dan daging serta juga bumbu-bumbuan, yang dilakukan secara insidental terutama saat situasi harga meningkat. Sebelum tahun 1998, tugas yang diberikan kepada Bulog ditujukan untuk mengendalikan harga produsen dan menjaga stabilitas harga beras konsumen, serta menyediakan stok beras antar waktu dan antar daerah untuk keperluan penyaluran rutin dan cadangan pemerintah untuk keperluan darurat atau keperluan lainnya. Bobot pengendalian harga produsen dan harga konsumen seimbang.

Mulai tahun 1998, Bulog kembali hanya menangani beras. Tugas yang diberikan kepada Bulog juga mengalami perubahan karena berubahnya kebijakan perberasan yang dilakukan pemerintah. Perlindungan kepada petani melalui harga dasar tetap menjadi prioritas utama. Sedangkan untuk

stabilisasi harga konsumen mulai berkurang sejalan dengan terus tertekannya harga beras domestik. Sebaliknya peran Bulog untuk membantu kelompok miskin yang rawan pangan semakin menonjol.

Isu-isu penting yang berkaitan dengan peran dan tugas Bulog akhir-akhir ini dan pada tahun-tahun mendatang terdapat beberapa hal, pertama yaitu mencakup ekspor beras, dimana banyak kalangan masyarakat yang ingin mengetahui seberapa banyak Negara Indonesia mampu melakukan ekspor beras dengan tidak mengurangi kebutuhan akan beras dalam negeri. Dalam hal tersebut, Bulog telah merencanakan bahwa kebutuhan akan beras dalam negeri harus tercukupi. Jika ada peluang untuk mengekspor pada jenis tertentu, itu akan dilakukan. Selain itu Bulog juga harus antisipatif dalam melihat perkembangan harga beras di tingkat dunia, termasuk perkembangan harga dan supply beras di dalam negeri. Pertanyaan lain yang timbul mengenai ekspor beras adalah target produksi beras yang ditetapkan Pemerintah pada awalnya, tetapi kondisi banjir, tidak memungkinkan untuk mencapai target semula. Selain itu, pada saat terjadi banjir di berbagai daerah, akan mempengaruhi panen dan pembelian beras dari Bulog ke masyarakat pada kondisi banjir akan menjadi permasalahan. Dalam hal tersebut, pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap kemungkinan gangguan dari alam yang sudah termasuk faktor yang di hitung yang terdapat di luar asumsi. Selain itu Bulog juga memiliki kebijakan HPP, stabilitas pasar, dan menjaga kelayakan penghasilan bagi petani tentu siap melakukan pembelian dalam kondisi apapun.

Permasalahan yang lain adalah distribusi beras yang utamanya beras untuk rakyat miskin harus benar-benar mengantisipasi perkembangan iklim dan cuaca. Baik di pusat maupun di Daerah harus melakukan langkah – langkah antisipasi yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara oleh Bulog, yang terpenting adalah rakyat tidak terlambat menerima pelayanan pasokan beras, dan tidak terjadi kelangkaan beras di berbagai daerah.

Isu lainnya, adalah menyangkut aset-aset Bulog yang tersebar di seluruh Indonesia, sudah saatnya Bulog menata kembali aset-asetnya yang mendatangkan sumber-sumber pendapatan yang baik. Penataannya tentu harus transparan, harus akuntabel, dan kemudian diarahkan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih baik lagi. Permasalahan lain yang dihadapi oleh Perum Bulog saat ini adalah dalam stabilisasi harga. Kita ketahui bahwa tidak mudah dalam menstabilkan harga, karena terdapat hukum-hukum pasar, market mechanism, meskipun tidak menganut penuh fundamentalisme pasar, dan selalu terdapat peran pemerintah. Kedepannya pemerintah mengharapkan Bulog juga melakukan stabilisasi harga di luar beras dalam upaya untuk menjaga inflasi pada tingkat yang baik.

Harga beras di pasaran pada akhir tahun 2009 dan awal tahun 2010 di Kabupaten Demak terus mengalami peningkatan diatas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan INPRES No. 7 Tahun 2009 tentang kebijakan perberasan, harga pembelian beras dalam negeri sebesar Rp. 5.060,00/kg. Berikut data kenaikan beras :

Tabel 1
Harga Beras di Kabupaten Demak
Bulan Nopember 2009 – Bulan Maret 2010

Bulan	Harga/Kg
Nopember 2009	Rp. 4.700,00
Desember 2009	Rp. 5.200,00
Januari 2010	Rp. 5.400,00
Februari 2010	Rp. 6.000,00
Maret 2010	Rp. 6.300,00

Sumber: Perum BULOG, 2009-2010

Data di atas menunjukkan harga beras yang mengalami kenaikan dari bulan ke bulan. Harga tersebut, di atas harga pokok pembelian pemerintah yang sebesar Rp. 5.060,00/Kg.

Sebenarnya dalam kondisi normal, di mana Kabupaten Demak memiliki areal lahan pertanian padi yang luas dan berpotensi menghasilkan panen yang melimpah akan membuat harga gabah dan beras murah tapi tiap bulan harga beras perKg mengalami kenaikan.

Permasalahan lain adalah tata perusahaan yang baik dalam Bulog atau *Good Corporate Governance*, karena selama ini citra Bulog di mata masyarakat cukup buruk, dengan bergulirnya pemberitaan mengenai korupsi di tubuh Bulog. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab Bulog dalam mengubah citra Bulog di mata masyarakat. Kedepannya, Bulog benar-benar membangun tata perusahaan yang baik, bagus, responsif, transparan, akuntabel dan juga berkemampuan atau capable melaksanakan tugas-tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **”Evaluasi Kinerja Perum Bulog Dalam Pengendalian Harga Beras (Studi Kasus di Kabupaten Demak)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian terlebih dahulu harus ditentukan perumusan masalah yang harus dipecahkan sebelum melakukan penelitian. Adapun perumusan masalah yang penulis kemukakan sesuai objek yang akan diteliti dan sesuai judul Penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan harga beras di Kabupaten Demak tahun 2010?
2. Langkah-langkah apa saja yang ditempuh Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras di Kabupaten Demak?
3. Bagaimana efektivitas langkah-langkah yang ditempuh Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras di Kabupaten Demak ?
4. Apa saja yang menjadikan kendala Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras di Kabupaten Demak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja pegawai Perusahaan Umum Bulog dengan studi kasus di Kabupaten Demak.

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras di Kabupaten Demak.

2. Mengetahui langkah-langkah yang ditempuh Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras di Kabupaten Demak.
3. Mengetahui efektivitas langkah-langkah yang ditempuh Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras di Kabupaten Demak.
4. Mengetahui kendala Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras di Kabupaten Demak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada Perum Bulog mengenai kinerja Bulog di Kabupaten Demak.

2. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi Universitas, sebagai tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berikutnya yang ada kaitannya dengan Perum Bulog.
- b. Bagi masyarakat, sebagai tambahan informasi mengenai peran dan tugas Perum Bulog dalam pengendalian harga beras.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Ketahanan Pangan

Pangan diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama warga Indonesia. Beras memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi pedesaan), lingkungan (menjaga tata guna air dan udara bersih) dan sosial politik (perekat bangsa, ketertiban dan keamanan). Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak, dan vitamin. Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat disemua daerah, mudah memperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau. Hal ini diwujudkan dengan bekerjanya sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi. Program peningkatan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun ditingkat masyarakat.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Ketahanan Pangan (<http://www.deptan.go.id>)

Tujuan program ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya ketersediaan pangan.
- 2) Mengembangkan diversifikasi pangan.
- 3) Mengembangkan kelembagaan pangan.

4) Mengembangkan usaha pengelolaan pangan.

Sasaran yang ingin dicapai dari program ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Tercapainya ketersediaan pangan di tingkat regional dan masyarakat yang cukup.
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras melalui pengalihan konsumsi non beras.

2.1.2 Faktor yang menentukan ketahanan pangan

Menurut Yustika, Ahmad Erani (2008:6), faktor yang menentukan ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

1) Lahan

Masalah lahan pertanian akibat konversi yang tidak bisa dibendung yang diakibatkan distribusi lahan yang timpang. Selain itu pertumbuhan penduduk di perdesaan akan hanya menambah jumlah petani gurem atau petani yang tidak memiliki lahan sendiri atau dengan lahan yang sangat kecil yang tidak mungkin menghasilkan produksi yang optimal akan semakin banyak. Lahan pertanian yang semakin terbatas juga akan menaikkan harga jual atau sewa lahan, sehingga hanya sedikit petani yang mampu membeli atau menyewanya, dan akibatnya, kepincangan dalam distribusi lahan tambah besar.

2) Infrastrukur

Bahwa lambannya pembangunan infrastruktur boleh jadi ikut berperan mengapa pertanian di Indonesia kurang kokoh dalam mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pertanian menjadi syarat penting guna mendukung pertanian yang maju. Ia mengatakan bahwa di Jepang, survei infrastruktur selalu dilakukan untuk menjamin kelancaran distribusi produk pertanian. Perbaikan infrastruktur di negara maju ini terus dilakukan sehingga tidak menjadi kendala penyaluran produk pertanian, yang berarti juga tidak mengganggu atau mengganggu arus pendapatan ke petani.

3) Teknologi dan Sumber Daya Manusia

Teknologi dan sumber daya manusia (SDM), bukan hanya jumlah tetapi juga kualitas, sangat menentukan keberhasilan Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan. Bahkan dapat dipastikan bahwa pemakaian teknologi dan input-input modern tidak akan menghasilkan output yang optimal apabila kualitas petani dalam arti pengetahuan atau wawasannya mengenai teknologi pertanian, pemasaran, standar kualitas, dll. rendah. Lagipula, teknologi dan SDM adalah dua faktor produksi yang sifatnya komplementer, dan ini berlaku di semua sektor, termasuk pertanian.

4) Energi

Energi sangat penting untuk kegiatan pertanian lewat dua jalur, yakni langsung dan tidak langsung. Jalur langsung adalah energi seperti listrik atau BBM yang digunakan oleh petani dalam kegiatan bertani, misalnya dalam menggunakan traktor. Sedangkan tidak langsung adalah

energi yang digunakan oleh pabrik pupuk dan pabrik yang membuat input-input lainnya dan alat-alat transportasi dan komunikasi

5) Dana

Penyebab lainnya yang membuat rapuhnya ketahanan pangan adalah keterbatasan dana. Diantara sektor-sektor ekonomi, pertanian yang selalu paling sedikit mendapat kredit dari perbankan (dan juga dana investasi) di Indonesia. Berdasarkan SP 2003, tercatat hanya sekitar 3,06% dari jumlah petani yang pernah mendapatkan kredit bank, sedangkan sisanya membiayai kegiatan bertani dengan menggunakan uang sendiri

6) Lingkungan fisik/iklim

Tidak diragukan bahwa pemanasan global turut berperan dalam menyebabkan krisis pangan. Pertanian, terutama pertanian pangan, merupakan sektor yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim, mengingat pertanian pangan di Indonesia masih sangat mengandalkan pada pertanian sawah yang berarti sangat memerlukan air yang tidak sedikit (Samhadi, 2007:51).

7) Relasi Kerja

Relasi kerja akan menentukan proporsi nisbah ekonomi yang akan dibagi kepada para pelaku ekonomi di pedesaan. Dalam kata lain, pola relasi kerja yang ada di sektor pertanian akan sangat menentukan apakah petani akan menikmati hasil pertaniannya atau tidak. Untuk mengidentifikasi bagaimana pola relasi kerja yang berlaku selama ini di

Indonesia bisa dilakukan dengan memakai beberapa indikator, diantaranya nilai tukar petani (NTP).

8) Ketersediaan input lainnya

Terutama keterbatasan pupuk dan harganya yang meningkat terus merupakan hambatan serius bagi pertumbuhan pertanian di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini dilihat dari ketersediaan input lainnya. Walaupun niatnya jelas, namun dalam implementasi di lapangan, pemerintah selama ini kelihatan kurang konsisten dalam usahanya memenuhi pupuk bersubsidi untuk petani agar ketahanan pangan tidak terganggu. Tanpa ketersediaan sarana produksi pertanian, termasuk pupuk dalam jumlah memadai dan dengan kualitas baik dan relatif murah, sulit diharapkan petani, yang pada umumnya miskin, akan mampu meningkatkan produksi komoditas pertanian.

2.2. Harga

2.2.1 Definisi Harga

Menurut Stanton harga adalah *Price is value expressed in terms of dollars and cents, or any other monetary medium of exchange* yang kurang lebih memiliki arti harga adalah nilai yang dinyatakan dalam dolar dan sen atau medium moneter lainnya sebagai alat tukar (<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/strategi-penetapan-harga-produk-baru.html>). Menurut Basu Swastha (1986: 147) Harga diartikan

sebagai Jumlah uang (kemungkinan ditambah barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.

Menurut menurut Alex S Nitisemito (1991:55) Harga diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain.

Harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Tjiptono (2001 : 151). Dan harga merupakan unsur satu-satunya dari unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan di banding unsur bauran pemasaran yang lainnya (Tujuan Penetapan Harga

2.2.2 Tujuan penetapan harga, antara lain:

1. Berorientasi pada Laba, bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi atau sering disebut maksimisasi laba.
2. Berorientasi pada Volume, bahwa penetapan harga sedemikian rupa agar dapat mencapai tingkat volume penjualan tertentu, nilai penjualan atau pangsa pasar tertentu.

3. Berorientasi pada citra (*image*), bahwa penetapan harga tertentu dapat membentuk citra perusahaan, misalnya menetapkan harga tinggi dapat membentuk citra perusahaan yang prestisius, sementara menetapkan harga rendah memungkinkan menjaga nilai perusahaan tertentu (menjaga harga yang terendah di suatu daerah).
4. Berorientasi pada Stabilitas Harga, hal ini dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (*industry leader*).

2.2.3 Strategi Penetapan Harga

Harga yang ditetapkan atas suatu produk baru harus dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan pasar. Selain itu untuk mencegah timbulnya persaingan yang sengit. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan harga produk baru, Tjiptono (2001: 172);

1. *Skimming Pricing*, merupakan strategi yang menetapkan harga tinggi pada suatu produk baru, dengan dilengkapi aktifitas promosi yang gencar, tujuannya adalah :
 - a. Melayani pelanggan yang tidak terlalu sensitive terhadap harga, selagi persaingannya belum ada.
 - b. Untuk menutupi biaya-biaya promosi dan riset melalui margin yang besar.

c. Untuk berjaga-jaga terjadinya kekeliruan dalam penetapan harga, karena akan lebih mudah menurunkan harga dari pada menaikkan harga awal.

2. *Penetration Pricing*, merupakan strategi dengan menetapkan harga rendah pada awal produksi, dengan tujuan dapat meraih pangsa pasar yang besar dan sekaligus menghalangi masuknya para pesaing. Dengan harga rendah perusahaan dapat pula mengupayakan tercapainya skala ekonomi dan menurunkan biaya per-unit. Strategi ini mempunyai perspektif jangka panjang, dimana laba jangka pendek dikorbankan demi tercapainya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ada empat bentuk harga yang menggunakan strategi *Penetration Pricing*, antara lain:

a. Harga yang dikendalikan (*restrained price*), yaitu harga yang ditetapkan dengan tujuan mempertahankan tingkat harga tertentu selama periode inflasi.

Pengendalian harga adalah penetapan batas harga barang untuk menghindari kenaikan harga sehingga sesuai dengan daya beli rakyat dan biasanya dilakukan jika persediaan barang-barang sangat terbatas

b. *Elimination price*, yaitu merupakan penetapan harga pada tingkat tertentu yang dapat menyebabkan pesaing - pesaing tertentu (terutama yang kecil) keluar dari persaingan.

- c. *Promotion price* adalah harga yang ditetapkan rendah dengan kualitas sama, dengan tujuan untuk mempromosikan produk tertentu.
- d. *Keep-out price*, merupakan penetapan harga tertentu sehingga dapat mencegah para pesaing memasuki pasar.

2.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Peninjauan Kembali Strategi Penetapan Harga

Menurut Tjiptono (2001 : 174) ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan harus selalu meninjau kembali strategi penetapan harga produk-produknya yang sudah ada di pasar, diantaranya adalah :

- a) Adanya perubahan dalam lingkungan pasar, misalnya pesaing besar menurunkan harga.
- b) Adanya pergeseran permintaan, misalnya terjadinya perubahan selera konsumen.

Dalam melakukan peninjauan kembali penetapan harga yang telah dilakukan, perusahaan mempunyai tiga alternatif strategi, yaitu:

1. Mempertahankan Harga, strategi ini dilaksanakan dengan tujuan mempertahankan posisi dalam pasar dan untuk meningkatkan citra yang baik di masyarakat.
2. Menurunkan Harga, Strategi ini sulit untuk dilaksanakan karena perusahaan harus memiliki kemampuan finansial yang besar, sementara konsekuensi yang harus ditanggung, perusahaan menerima

margin laba dengan tingkat yang kecil. Ada tiga alasan atau penyebab perusahaan harus menurunkan harga produk yang sudah mapan, yaitu: (1) Strategi Defensif, dimana perusahaan memotong harga guna menghadapi persaingan yang makin ketat, (2) Strategi Ofensif, di mana perusahaan mempunyai tujuan untuk memenangkan persaingan dengan produk kompetitor, dan (3) Respon terhadap kebutuhan pelanggan yang disebabkan oleh perusahaan lingkungan. Misalnya inflasi yang berkelanjutan Dan adanya kenaikan harga yang makin melonjak yang menyebabkan konsumen makin selektif dalam berbelanja dan dalam penentuan harga.

3. Menaikan Harga, suatu perusahaan melakukan kebijakan menaikkan harga dengan tujuan untuk mempertahankan profitabilitas dalam periode inflasi dan untuk melakukan segmentasi pasar tertentu. Agar strategi ini dapat memberikan hasil yang memuaskan, ada dua persyaratan yang harus dilakukan oleh perusahaan, antara lain : (1) Elastisitas harga relatif rendah, namun elastisitas tetap tinggi bila berkaitan dengan kualitas dan distribusi, dan (2) Dorongan (*reinforcement*) dari unsur bauran pemasaran lainnya tetap menunjang.

2.3 Kinerja

Pengertian kinerja adalah hasil dari prestasi kerja yang telah dicapai seorang karyawan sesuai dengan fungsi tugasnya pada periode tertentu (Bernadin

& Russell, 1993 : 379). Menurut Maryoto, (2000:91) dalam Jurnal Daya Saing yang ditulis oleh Hernowo, kinerja karyawan adalah hasil kerja selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misal standar, target/sasaran atau kriteria yang telah disepakati bersama. Gibson (1996:70) dalam Jurnal Daya Saing yang ditulis oleh Hernowo, menyatakan kinerja adalah hasil yang diinginkan dari perilaku. Kinerja individu merupakan dasar dari kinerja organisasi. Whitmore (2002:104) menyebutkan bahwa “kinerja” memiliki asal kata “kerja” artinya aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi dalam menjalankan tugas yang menjadi perkerjaannya. Kinerja artinya suatu perbuatan, suatu prestasi atau penampilan umum dari keterampilan. Mangkunegara (2000: 97) mengatakan, bahwa istilah kinerja berasal dari kata “*job performance*” atau “*actual performance*” yaitu unjuk kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedermayanti (2000: 144) mengemukakan bahwa kinerja individu itu adalah bagaimana seseorang melaksanakan pekerjaannya atau unjuk kerja. Dari pengertian ini terlihat kinerja merupakan perbuatan atau proses yang dapat dinilai oleh orang lain. Suyudi Prawirosentono (1999: 2) dalam Jurnal Pendidikan Vol 1 No. 5 (2005) memberikan batasan kinerja adalah sebagai berikut:

“Melakukan suatu kegiatan dan penyempurnaannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil seperti yang diharapkan oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan etika”.

Setiap individu mempunyai perbedaan dalam sikap, perilaku, pendidikan, kemampuan dan pengetahuan. Hal ini mencerminkan bahwa pada prinsipnya manusia berbeda antara manusia yang satu dengan yang lainnya, lambang kemampuan setiap individu inilah yang biasa disebut dengan kinerja.

Berdasarkan beberapa pengertian kinerja diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu penilaian terhadap apa yang telah dilakukan pegawai, apa yang dikerjakan pegawai dalam kurun waktu tertentu, dimana dari kinerja tersebut seorang pemimpin akan dapat menilai bagaimana kualitas pegawai.

Pengertian kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan.

Menurut Darmawati, Khomsyiah dan Rika Gelar R, (2005), “Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan”, kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terkonsentrasi atau tidaknya terkonsentrasinya kepemilikan, manipulasi laba, serta pengungkapan laporan keuangan. Kepemilikan yang banyak terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hubungannya dengan kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu

periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. *Disclosure* laporan keuangan akan memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan. *Disclosure* sebagai salah satu aspek *good corporate governance* diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham serta menentukan prospek suatu perusahaan di masa yang akan datang. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perusahaan yang baik.

Prawiro Sentono (1999: 150) menyebutkan mengenai dimensi kinerja. Menurutnya, kinerja meliputi hasil keterampilan, prestasi dan sikap dari manusia. Sikap seseorang dapat termasuk di dalamnya yaitu integritas, loyalitas, kepribadian, ketaatan. Dalam penelitian ini, maksud dari kinerja adalah mengacu ke pengertian perbuatan, prestasi, dan keterampilan yang ditunjukkan oleh seseorang dalam melakukan pekerjaan dalam suatu organisasi/perusahaan, sehingga dapat dinilai mengenai kualitasnya, apakah kinerjanya rendah, sedang ataukah tinggi.

Menurut Prawiro Sentono (1999:154) ada 5 (lima) faktor dalam penilaian kinerja, yaitu:

1. Kualitas pekerjaan meliputi: akuisi, ketelitian, penampilan dan penerimaan keluaran;
2. Kuantitas Pekerjaan meliputi: Volume keluaran dan kontribusi;
3. Supervisi yang diperlukan, meliputi: membutuhkan saran, arahan atau perbaikan;
4. Kehadiran meliputi: regularitas, dapat dipercaya/diandalkan dan ketepatan waktu;
5. Konservasi meliputi: pencegahan, pemborosan, kerusakan dan pemeliharaan.

Bahkan, penelitian yang dilakukan oleh McKenna dan Beach dalam Dessler (1997) menyimpulkan bahwa faktor-faktor kinerja yang paling sering digunakan sebagai indikator penelitian adalah : pengetahuan, kemampuan, keterampilan kerja, sikap terhadap pekerjaan (antusiasme, komitmen dan motivasi), kualitas kerja, volume hasil produksi dan interaksi (komunikasi, hubungan dalam kelompok).

Karyawan menginginkan dan memerlukan balikan berkenaan dengan prestasi mereka dan penilaian menyediakan kesempatan untuk memberikan balikan kepada mereka jika kinerja tidak sesuai dengan standar, maka penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau kemajuan karyawan dan untuk menyusun rencana peningkatan kinerja. (Dessler 1992:536). Dessler (1997) memberikan contoh kriteria penilaian kinerja karyawan meliputi : kualitas,

produktivitas (kualitas dan efisiensi), pekerjaan dengan menggunakan pengetahuan yang terukur.

2.4 Perum Bulog

Sebagai lembaga yang ditugasi pemerintah melaksanakan kebijakan perberasan, peran Bulog masa depan sangat terkait dengan rumusan kebijakan yang ditetapkan. Pengalaman selama ini menunjukkan Bulog dapat menyesuaikan diri terhadap tugas yang diberikan karena jaringan logistiknya yang luas dan menyebar.

Secara operasional, Bulog dapat melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembelian gabah/beras atau pangan lain untuk keperluan melindungi petani atau keperluan lain, menyimpan cadangan beras atau pangan lain di gudang-gudang Bulog untuk keperluan cadangan pangan pemerintah untuk memenuhi *outlet* rutin kepada pemerintah atau masyarakat miskin, atau cadangan beras yang ditujukan untuk keperluan insidental penanganan akibat bencana alam, pengungsi atau keadaan darurat lain. Jaringan yang ada juga dapat difungsikan membantu sistem logistik nasional bagi masyarakat dalam rangka distribusi atau perdagangan beras atau pangan. Sistem dan jaringan yang dikembangkan saat ini cukup luas jangkauannya sampai ke desa-desa.

2.4.1 Tugas dan Peran Bulog

Tugas yang diberikan kepada Bulog merupakan implementasi kebijakan harga seperti yang diusulkan Affif dan Mears tahun 1969 yang meliputi (1) menyangga harga dasar yang cukup tinggi untuk

merangsang produksi, (2) perlindungan harga maksimum yang menjamin harga yang layak bagi konsumen, (3) perbedaan harga yang layak antara harga dasar dengan harga maksimum agar merangsang perdagangan, (4) hubungan harga yang wajar antara harga domestik dengan harga internasional (Mears, 1982).

Untuk mencapai tujuan di atas, paket instrumen kebijakan yang ditempuh adalah: (1) menetapkan harga dasar, (2) melakukan pembelian gabah/beras hasil produksi pada masa panen, (3) memberikan tambahan gaji dalam bentuk beras kepada PNS dan TNI/Polri, (4) melakukan operasi pasar dengan menambah pasokan beras ke pasar umum pada saat paceklik dan di daerah defisit, (5) mengisolasi pasar beras domestik dari pengaruh pasar beras dunia melalui monopoli impor beras hanya oleh Bulog, (6) mendistribusikan beras ke berbagai daerah dan menetapkan harga jual beras yang berbeda antar daerah untuk merangsang perdagangan swasta. Dari segi pembiayaan, operasi Bulog juga didukung oleh kredit murah yang berasal dari kredit likuiditas.

2.4.2 Alur Pengadaan

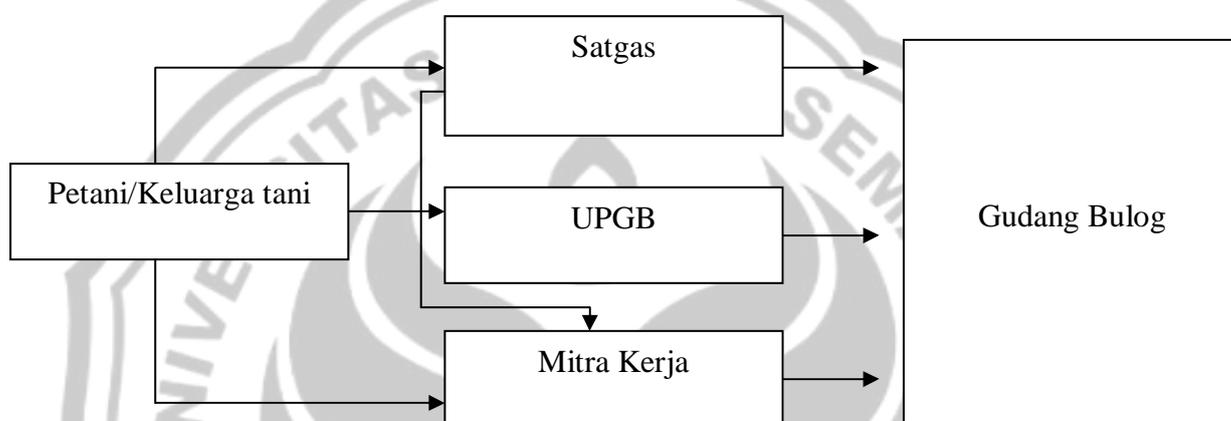
Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri berawal dari produksi petani. Dengan adanya Harga Pembelian Pemerintah (HPP), petani menjadi aman dalam melaksanakan usaha tani padinya. Pengadaan dalam negeri menjadi jaminan harga dan sekaligus jaminan pasar atas hasil produksinya. Dengan “semangat” berproduksinya,

produksi padi akan meningkat dan ketersediaan pangan (beras) dalam negeri akan mencukupi. Salah satu pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan (*availability*) dapat tercapai.

Petani dengan adanya HPP mempunyai perkiraan harga untuk melepas produksinya. Pilihan pasar yang terbuka antara Bulog dan pasar umum diharapkan akan memberikan daya tawar yang lebih baik bagi petani. Dengan HPP sebagai patokan harga jualnya, petani bisa memilih untuk menjual ke pasar umum atau ke Bulog. Dari sisi operasional Bulog, terdapat tiga saluran dalam penyerapan produksi petani yaitu Satgas, Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB) dan Mitra Kerja. Ketiga saluran tersebut membeli gabah langsung pada petani dengan patokan HPP. Umumnya gabah yang dibeli adalah gabah pada kualitas apa adanya (di luar kualitas yang ada dalam Inpres). Sedangkan gabah yang diterima Bulog adalah Gabah Kering Giling (GKG) yaitu gabah dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar hampa kotoran maksimum 3%. Kualitas ini cukup tahan disimpan dalam waktu tertentu dan siap digiling untuk menghasilkan beras standar pada saatnya. Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2009, harga GKG di tingkat penggilingan adalah Rp.3.300/kg dan di gudang BULOG Rp.3.345/kg. Satgas yang tidak memiliki sarana pengeringan maupun pengolahan dapat bekerjasama dengan UPGB atau Mitra Kerja melakukan pengolahan baik untuk mendapatkan GKG maupun beras standar. Dalam Inpres Nomor 7 tahun 2009 persyaratan kualitas

beras yang diterima Bulog adalah beras dengan kadar air maksimal 14%, butir patah maksimum 20%, butir menir maksimum 2% dan derajat sosoh minimal 95%. Beras dengan kualitas tersebut diterima Bulog dengan harga Rp.5.060/kg di gudang Bulog (www.bulog.co.id)

Berikut ini adalah alur pengadaan gabah dan beras dari petani sampai ke Bulog:



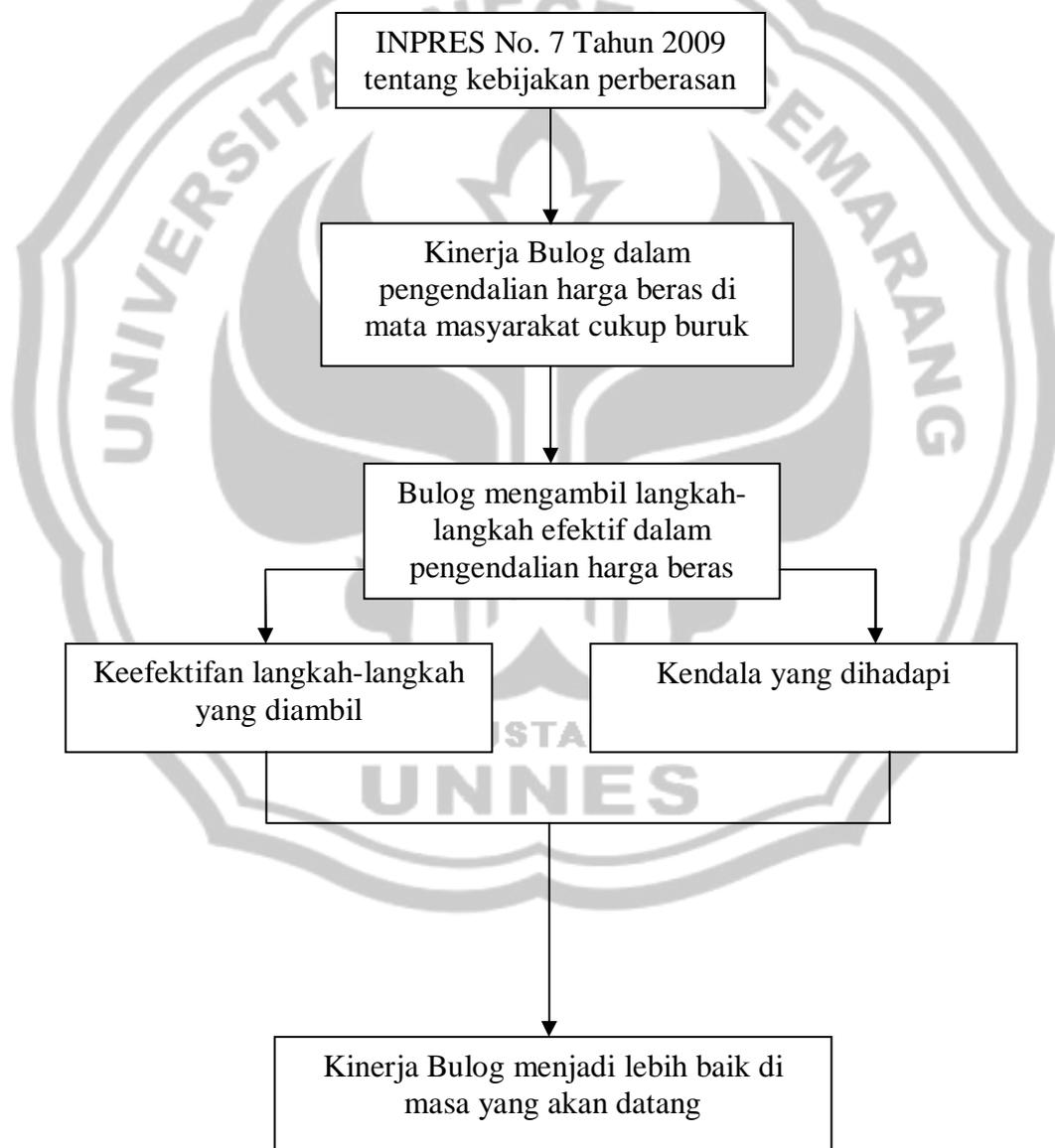
Sumber: www.bulog.go.id

Gambar 1. Alur Pengadaan Beras dari Petani Sampai Gudang Bulog

2.5 Kerangka Berpikir

Harga beras di pasaran terus mengalami peningkatan di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan INPRES No. 7 Tahun 2009 tentang kebijakan perberasan, harga pembelian beras dalam negeri sebesar Rp. 5.060,00/kg. Selama ini Bulog belum sepenuhnya menerapkan tata perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* dalam Bulog, sehingga citra Bulog di mata masyarakat cukup buruk, dengan bergulirnya pemberitaan mengenai korupsi di tubuh Bulog. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab Bulog

dalam mengubah citra Bulog di mata masyarakat, terutama dalam hal pengendalian harga beras. Untuk mengendalikan harga beras, Bulog harus mengambil langkah-langkah efektif, sehingga ke depannya Bulog benar-benar membangun tata perusahaan yang baik sehingga mampu tampil sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bagus, yang responsif, yang transparan, yang akuntabel dan juga berkemampuan atau *capable* melaksanakan tugas-tugasnya. Secara singkat, kerangka berpikir di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai situasi dan kejadian ataupun termasuk proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh fenomena yang ada berdasarkan informasi yang diberikan oleh narasumber (Sudarwan Danim, 2002:35). Penelitian diskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Best,1982:119). Penelitian ini juga disebut non eksperimen, karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Dengan metode deskriptif, peneliti memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal (West,1982:52).

Metode deskriptif dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain). Selain itu juga berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya melalui media massa, kata-kata, dan gambar. Dengan menggunakan pendekatan penelitian tersebut peneliti mengamati, mempelajari dan menganalisis kejadian atau fenomena yang terjadi

saat penelitian dilapangan terkait dengan kinerja perum Bulog dalam pengendalian harga beras.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya, pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti (Singgih Santoso & Fandy Tjiptono, 2004: 59)

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dalam Objek Penelitian di Perum Bulog Kabupaten Demak. Serta wawancara dengan petani dan masyarakat di Kabupaten Demak dengan teknik sampling. Sampel adalah bagian dari populasi atau sejumlah anggota populasi yang mewakili populasinya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan/publikasi lainnya (Marzuki, 2002 : 56)

Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya. Data sekunder juga disebut data tersedia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

berasal dari berbagai pustaka yang mendukung penelitian ini, baik buku maupun berbagai sumber seperti buku profil perusahaan Perum Bulog Kabupaten Demak, dan lain - lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengamatan, wawancara dan pemeriksaan dokumen.

Interview / Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal (Gulo, 2002). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara bertanya jawab secara langsung pada karyawan Perum Bulog untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras, langkah yang diambil Perum Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras, dan kendala-kendala yang dialami Perum Bulog dalam mengatasi harga beras. Wawancara dengan petani di Kabupaten Demak untuk mengetahui berapa panen yang diperoleh setiap kali panen dan apa saja yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas gabah yang dipanen dan beras yang dihasilkan, serta dengan masyarakat untuk mengetahui keefektifan kebijakan yang ditempuh Perum Bulog

3.4.2 Studi Dokumen

Studi dokumen diperlukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai permasalahan yang dibahas oleh penulis. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2005). Menurut Guba dan Lincoln (1981) dalam Muhammad (2005) dokumen dapat digunakan untuk keperluan penelitian karena memenuhi kriteria atau alasan yang dapat dipertanggung jawabkan seperti:

- (1) Dokumen merupakan sumber yang stabil.
- (2) Berguna sebagai bukti untuk pengujian.
- (3) Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah.
- (4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- (5) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diteliti.

Studi dokumen dilakukan di Perum Bulog dan BPS untuk mengetahui seluk beluk tentang Perum Bulog, mengetahui kondisi pertanian di Kabupaten Demak.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain).

Selain itu juga berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya melalui media massa, kata-kata, dan gambar. Dengan menggunakan pendekatan penelitian tersebut peneliti mengamati, mempelajari dan menganalisis kejadian atau fenomena yang terjadi saat penelitian dilapangan terkait dengan kinerja perum Bulog dalam pengendalian harga beras.

Analisis data dan pengumpulan data merupakan proses yang tidak terpisahkan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari informan kunci hasil wawancara, dan hasil pengamatan yang tercatat dalam berkas di lapangan, dan hasil studi dokumentasi.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

b. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya, pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti (Singgih Santoso & Fandy Tjiptono, 2004: 59)

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dalam Objek Penelitian di Perum Bulog Kabupaten Demak. Serta wawancara dengan petani dan masyarakat di Kabupaten Demak dengan teknik sampling. Sampel adalah bagian dari populasi atau sejumlah anggota populasi yang mewakili populasinya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan/publikasi lainnya (Marzuki, 2002 : 56)

Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya. Data sekunder juga disebut data tersedia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai pustaka yang mendukung penelitian ini, baik buku maupun berbagai sumber seperti buku profil perusahaan Perum Bulog Kabupaten Demak, dan lain - lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengamatan, wawancara dan pemeriksaan dokumen.

Interview / Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal (Gulo, 2002). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara bertanya jawab secara langsung pada karyawan Perum Bulog untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras, langkah yang diambil Perum Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras, dan

kendala-kendala yang dialami Perum Bulog dalam mengatasi harga beras. Wawancara dengan petani di Kabupaten Demak untuk mengetahui berapa panen yang diperoleh setiap kali panen dan apa saja yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas gabah yang dipanen dan beras yang dihasilkan, serta dengan masyarakat untuk mengetahui keefektifan kebijakan yang ditempuh Perum Bulog

3.4.2 Studi Dokumen

Studi dokumen diperlukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai permasalahan yang dibahas oleh penulis. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2005). Menurut Guba dan Lincoln (1981) dalam Muhammad (2005) dokumen dapat digunakan untuk keperluan penelitian karena memenuhi kriteria atau alasan yang dapat dipertanggung jawabkan seperti:

- (6) Dokumen merupakan sumber yang stabil.
- (7) Berguna sebagai bukti untuk pengujian.
- (8) Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah.
- (9) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- (10) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diteliti.

Studi dokumen dilakukan di Perum Bulog dan BPS untuk

mengetahui seluk beluk tentang Perum Bulog, mengetahui kondisi pertanian di Kabupaten Demak.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain). Selain itu juga berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya melalui media massa, kata-kata, dan gambar. Dengan menggunakan pendekatan penelitian tersebut peneliti mengamati, mempelajari dan menganalisis kejadian atau fenomena yang terjadi saat penelitian dilapangan terkait dengan kinerja perum Bulog dalam pengendalian harga beras.

Analisis data dan pengumpulan data merupakan proses yang tidak terpisahkan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari informan kunci hasil wawancara, dan hasil pengamatan yang tercatat dalam berkas di lapangan, dan hasil studi dokumentasi.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

c. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya, pengumpulan

data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti (Singgih Santoso & Fandy Tjiptono, 2004: 59)

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dalam Objek Penelitian di Perum Bulog Kabupaten Demak. Serta wawancara dengan petani dan masyarakat di Kabupaten Demak dengan teknik sampling. Sampel adalah bagian dari populasi atau sejumlah anggota populasi yang mewakili populasinya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan/publikasi lainnya (Marzuki, 2002 : 56)

Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya. Data sekunder juga disebut data tersedia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai pustaka yang mendukung penelitian ini, baik buku maupun berbagai sumber seperti buku profil perusahaan Perum Bulog Kabupaten Demak, dan lain - lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengamatan, wawancara dan pemeriksaan dokumen.

Interview / Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal (Gulo, 2002). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara bertanya jawab secara langsung pada karyawan Perum Bulog untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras, langkah yang diambil Perum Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras, dan kendala-kendala yang dialami Perum Bulog dalam mengatasi harga beras. Wawancara dengan petani di Kabupaten Demak untuk mengetahui berapa panen yang diperoleh setiap kali panen dan apa saja yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas gabah yang dipanen dan beras yang dihasilkan, serta dengan masyarakat untuk mengetahui keefektifan kebijakan yang ditempuh Perum Bulog

3.4.2 Studi Dokumen

Studi dokumen diperlukan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai permasalahan yang dibahas oleh penulis. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2005). Menurut Guba dan Lincoln (1981) dalam Muhammad (2005) dokumen dapat digunakan untuk keperluan penelitian karena memenuhi kriteria atau alasan yang dapat dipertanggung jawabkan seperti:

- (1) Dokumen merupakan sumber yang stabil.
- (2) Berguna sebagai bukti untuk pengujian.
- (3) Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah.
- (4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- (5) Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diteliti.

Studi dokumen dilakukan di Perum Bulog dan BPS untuk mengetahui seluk beluk tentang Perum Bulog, mengetahui kondisi pertanian di Kabupaten Demak.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain). Selain itu juga berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya melalui media massa, kata-kata, dan gambar. Dengan menggunakan pendekatan penelitian tersebut peneliti mengamati, mempelajari dan menganalisis kejadian atau fenomena yang terjadi saat penelitian dilapangan terkait dengan kinerja perum Bulog dalam pengendalian harga beras.

Analisis data dan pengumpulan data merupakan proses yang tidak terpisahkan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari informan kunci hasil wawancara, dan hasil pengamatan yang tercatat dalam berkas di lapangan, dan hasil studi dokumentasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Demak

a. Keadaan Geografis

Wilayah penelitian ini adalah Kabupaten Demak yang terletak pada koordinat $6^{\circ}43'26''$ - $7^{\circ}09'43''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}27'58''$ - $110^{\circ}48'47''$ Bujur Timur. Sedangkan batas Kabupaten Demak adalah :

- (1) Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kabupaten Jepara
- (2) Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- (3) Sebelah Barat : Kabupaten Semarang
- (4) Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Grobogan

Secara administratif luas Kabupaten Demak adalah 89.742 ha, terdiri atas 14 Kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan. Ketinggian permukaan tanah dari permukaan laut (elevasi) terletak mulai dari 0 m sampai dengan 100 m.

b. Keadaan Demografis

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Kabupaten Demak dalam angka tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Demak sebanyak 1.085.983 orang, terdiri atas 536.243 laki-laki (49,38%) dan 549740 perempuan (50,62%), jumlah penduduk ini naik sebanyak 9.003 orang atau sekitar 0,84 % dari tahun sebelumnya.

Menurut kelompok umur, sebagian besar penduduk Kabupaten Demak termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 691.358 orang (63,66%) dan selebihnya 351.367 orang (32,35%) berusia dibawah 15 tahun dan 43.258 orang (3,99%) berusia 65 tahun keatas.

2. Tenaga Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yang dimaksud dengan penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas. Penduduk usia kerja ini dibedakan sebagai angkatan kerja yang terdiri dari bekerja dan mencari pekerjaan, serta bukan angkatan kerja yang terbagi atas bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Penduduk Kabupaten Demak usia 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2009 sebanyak 494.917 orang yang terdiri atas laki-laki 290.282 orang dan perempuan 204.635 orang.

4.1.2 Gambaran Umum Perum Bulog

4.1.2.1 Sejarah Perum Bulog

a. Bulog Sebelum Menjadi Perum

Jika telusuri, sejarah Bulog tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga pangan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai pemerintahan sekarang ini. Secara umum tugas lembaga pangan tersebut adalah untuk menyediakan pangan bagi masyarakat pada harga yang terjangkau diseluruh daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Instrumen untuk

mencapai tujuan tersebut dapat berubah sesuai kondisi yang berkembang.

Campur tangan pemerintah dalam komoditas beras diawali sejak Maret 1933 yaitu di zaman pemerintahan Belanda. Saat itu, untuk pertama kalinya pemerintah Belanda mengatur kebijakan perberasan, yaitu dengan menghapus impor beras secara bebas dan membatasi impor melalui sistem lisensi.

Latar belakang ikut campurnya pemerintah Belanda dalam perberasan waktu itu adalah karena terjadinya fluktuasi harga beras yang cukup tajam (tahun 1919/1920) dan sempat merosot tajam pada tahun 1930, sehingga petani mengalami kesulitan untuk membayar pajak.

Menjelang pecahnya Perang Dunia II, pemerintah Belanda memandang perlu untuk secara resmi dan permanen mendirikan suatu lembaga pangan. Tanggal 25 April 1939, lahirlah suatu lembaga pangan yang disebut *Voeding Middelen Fonds* (VMF). Lembaga pangan ini banyak mengalami perubahan nama maupun fungsi. Secara ringkas, perkembangannya sebagai berikut:

Tugas Bulog semakin bertambah. Komoditi yang dikelola bertambah menjadi gula pasir (1971), terigu (1971), daging (1974), jagung (1978), kedelai (1977), kacang tanah (1979), kacang hijau (1979), telur dan daging ayam pada Hari Raya, Natal/Tahun Baru.

Kebijaksanaan Stabilisasi Harga Beras yang berorientasi pada operasi bufferstock dimulai tahun 1970.

Stabilisasi harga bahan pangan terutama yang dikelola Bulog masih tetap menjadi tugas utama di era 1980-an. Orientasi bufferstock bahkan ditunjang dengan dibangunnya gudang-gudang yang tersebar di wilayah Indonesia. Struktur organisasi Bulog diubah sesuai Keppres No. 39/1978 tanggal 6 Nopember 1978 dengan tugas membantu persediaan dalam rangka menjaga kestabilan harga bagi kepentingan petani maupun konsumen sesuai kebijaksanaan umum Pemerintah.

Penyempurnaan organisasi terus dilakukan. Melalui Keppres RI No. 50/1995 Bulog ditugaskan mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, tepung terigu, kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi global, tugas pokok Bulog dipersempit melalui Keppres No. 45 / 1997 tanggal 1 Nopember 1997 yaitu hanya mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras dan gula. Selang beberapa bulan, sesuai LOI tanggal 15 Januari 1998, Bulog hanya memonopoli beras saja.

Liberalisasi beras mulai dilaksanakan sesuai Keppres RI No. 19/1998 tanggal 21 Januari 1998 dan tugas pokok Bulog hanya mengelola beras saja. Tugas pokok Bulog diperbaharui kembali melalui Keppres no. 29/2000 tanggal 26 Pebruari 2000 yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi,

pengendalian harga beras dan usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas tersebut tidak berjalan lama karena mulai 23 Nopember 2000 keluar Keppres No. 166/2000 dimana tugas pokoknya melaksanakan tugas pemerintah bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya, Keppres No.03/2001 tanggal 13 September 2001 mengatur kembali tugas dan fungsi Bulog. Tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kedudukan sebagai lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

b. Peralihan Menuju Perum

Selama lebih dari 30 tahun Bulog telah melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menangani bahan pangan pokok khususnya beras dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. Manajemen Bulog tidak banyak berubah dari waktu ke waktu, meskipun ada perbedaan tugas dan fungsi dalam berbagai periode. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, status hukum Bulog adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) berdasarkan Keppres RI No. 39 tahun 1978. Namun, sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 timbul tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah dipangkas secara drastis

sehingga semua kepentingan nasional termasuk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tekanan tersebut terutama muncul dari negara-negara maju pemberi pinjaman khususnya AS dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank.

Konsekuensi logis yang harus diterima dari tekanan tersebut adalah Bulog harus berubah secara total. Dorongan untuk melakukan perubahan datang tidak hanya dari luar negeri, namun juga dari dalam negeri. Pertama, perubahan kebijakan pangan pemerintah dan pemangkasan tugas dan fungsi Bulog sehingga hanya diperbolehkan menangani komoditas beras, penghapusan monopoli impor seperti yang tertuang dalam beberapa Keppres dan SK Menperindag sejak tahun 1998. Keppres RI terakhir tentang Bulog, yakni Keppres RI No. 103 tahun 2001 menegaskan bahwa Bulog harus beralih status menjadi BUMN selambat-lambatnya Mei 2003. Kedua, berlakunya beberapa UU baru, khususnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli, dan UU No. 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang membatasi kewenangan Pemerintah Pusat dan dihapusnya instansi vertikal. Ketiga, masyarakat luas menghendaki agar Bulog terbebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan tuntutan reformasi, bebas dari KKN dan bebas dari pengaruh partai politik tertentu, sehingga Bulog mampu menjadi lembaga yang efisien, efektif, transparan dan mampu melayani kepentingan publik secara memuaskan. Keempat, perubahan ekonomi global yang mengarah pada liberalisasi pasar,

khususnya dengan adanya WTO yang mengharuskan penghapusan non-tariff barrier seperti monopoli menjadi tariff barrier serta pembukaan pasar dalam negeri. Dalam LoI yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan IMF pada tahun 1998, secara khusus ditekankan perlunya perubahan status hukum Bulog agar menjadi lembaga yang lebih efisien, transparan dan akuntabel.

Sehubungan dengan adanya tuntutan untuk melakukan perubahan, Bulog telah melakukan berbagai kajian-kajian baik oleh intern Bulog maupun pihak ekstern. Pertama, tim intern Bulog pada tahun 1998 telah mengkaji ulang peran Bulog sekarang dan perubahan lembaganya di masa mendatang. Hal ini dilanjutkan dengan kegiatan sarasehan pada bulan Januari 2000 yang melibatkan Bulog dan Dolog selindo dalam rangka menetapkan arahan untuk penyesuaian tugas dan fungsi yang kemudian disebut sebagai "Paradigma Baru Bulog". Kedua, kajian ahli dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1999 yang menganalisa berbagai bentuk badan hukum yang dapat dipilih oleh Bulog, yakni LPND seperti sekarang, atau berubah menjadi Persero, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Perjan atau Perum. Hasil kajian tersebut menyarankan agar Bulog memilih Perum sebagai bentuk badan hukum untuk menjalankan dua fungsi bersamaan, yaitu fungsi publik dan komersial. Ketiga, kajian auditor internasional Arthur Andersen pada tahun 1999 yang telah mengaudit tingkat efisiensi operasional Bulog. Secara khusus, Bulog disarankan agar

menyempurnakan struktur organisasi, dan memperbaiki kebijakan internal, sistim, proses dan pengawasan sehingga dapat memperbaiki efisiensi dan memperkecil terjadinya KKN di masa mendatang. Keempat , kajian bersama dengan Bernas Malaysia pada tahun 2000 untuk melihat berbagai perubahan yang dilakukan oleh Malaysia dan merancang kemungkinan penerapannya di Indonesia. Kelima , kajian konsultan internasional Price Waterhouse Coopers (PWC) pada tahun 2001 yang telah menyusun perencanaan korporasi termasuk perumusan visi dan misi serta strategi Bulog, menganalisa core business dan tahapan transformasi lembaga Bulog untuk berubah menjadi lembaga Perum. Keenam , dukungan politik yang cukup kuat dari anggota DPR RI, khususnya Komisi III dalam berbagai hearing antara Bulog dengan Komisi III DPR RI selama periode 2000-2002.

Berdasarkan hasil kajian, ketentuan dan dukungan politik DPR RI, disimpulkan bahwa status hukum yang paling sesuai bagi Bulog adalah Perum. Dengan bentuk Perum, Bulog tetap dapat melaksanakan tugas publik yang dibebankan oleh pemerintah terutama dalam pengamanan harga dasar pembelian gabah, pendistribusian beras untuk masyarakat miskin yang rawan pangan, pemupukan stok nasional untuk berbagai keperluan publik menghadapi keadaan darurat dan kepentingan publik lainnya dalam upaya mengendalikan gejolak harga. Disamping itu, Bulog dapat memberikan kontribusi operasionalnya kepada masyarakat sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan

melaksanakan fungsi usaha yang tidak bertentangan dengan hukum dan kaidah transparansi. Dengan kondisi ini gerak lembaga Bulog akan lebih fleksibel dan hasil dari aktivitas usahanya sebagian dapat digunakan untuk mendukung tugas publik, mengingat semakin terbatasnya dana pemerintah di masa mendatang. Dengan kondisi tersebut diharapkan perubahan status Bulog menjadi Perum dapat lebih menambah manfaat kepada masyarakat luas.

Dan pada akhirnya era baru itu datang juga, sejak tanggal 20 Januari 2003 LPND Bulog secara resmi berubah menjadi Perum Bulog berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2003 yang kemudian direvisi menjadi PP RI No. 61 Tahun 2003. Peluncuran Perum Bulog ini dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 Mei 2003..

4.1.3 Tugas Bulog Terkait dengan Pengendalian Harga Beras

4.1.3.1 Operasi Pasar

Dalam mengantisipasi terjadinya kenaikan harga beras serta mengawasi distribusi beras atau gabah baik pada petani dan masyarakat Kabupaten Demak, Bulog melakukan pengawasan dan pengendalian harga beras serta distribusinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Bulog melakukan strategi yang dapat mengantisipasi dan mengatasi kenaikan harga beras, Perum Bulog memiliki strategi yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Demak dengan melakukan Operasi pasar. Operasi pasar biasanya dilakukan untuk menambah jumlah pasokan beras

melalui penjualan, baik melalui pedagang besar, pengecer maupun penjualan langsung kepada para konsumen. Pelaksananya dilakukan sebagai berikut :

1. Operasi Pasar dilihat dari prosedurnya

a. Operasi Pasar Kontrak

Yang dimaksud dengan Operasi Pasar Kontrak adalah penjualan beras yang bertujuan untuk menstabilkan harga dan menyeimbangkan kondisi stok baik secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan keputusan/persetujuan Direksi Bulog dan pelaksanaan kontrak (Perjanjian Jual Beli) yang dilakukan di Bulog.

Prosedur penyalurannya adalah sebagai berikut :

- 1) Calon pembeli mengajukan Surat Permohonan untuk membeli beras yang kualitasnya masih baik atau yang telah menurun kepada Direksi Bulog
- 2) Atas dasar persetujuan tertulis dari Direksi Bulog terhadap permohonan calon pembeli tersebut maka pelaksanaan penjualan beras baru dapat diproses lebih lanjut.
- 3) Penjualan beras yang telah disetujui Direksi Bulog dilakukan secara Kontrak/Perjanjian Jual Beli (PJB) yang pelaksanaannya dilakukan di Bulog. Di dalam PJB tersebut mencantumkan antara lain jenis baran, kuantum, harga, jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari harga kontrak, cara

pembayaran, cara penyerahan beras, sanksi-sanksi dan lain-lain. Ketentuan uang jaminan pelaksanaan dimaksudkan sebagai jaminan agar pihak pembeli benar-benar melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam PJB, sedangkan bagi Bulog merupakan dasar untuk mengalokasikan stock.

- 4) Cara pembayaran penjualan secara kontrak/PJB dapat dilakukan secara tunai atau secara kredit dengan Bank Garansi dari Bank Pemerintah atau Bank yang disetujui Bulog. Tempat pelaksanaan pembayaran diutamakan di Bulog.
- 5) Apabila pembayaran penjualan beras dalam kontrak/PJB dilakukan secara tunai, maka setelah PJB ditandatangani selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Setor (SPS) HPBnya. Berdasarkan bukti setor yang telah diteliti kebenarannya oleh Divisi Pembiayaan, Divisi Penyaluran beras membuat Prinlog.
- 6) Apabila pembayaran dialkuakn secara kredit, maka paling lambat 7 (tujuh) hari setelah PJB ditandatangani, pihak pembeli harus sudah menyerahkan Bank Garansi senilai harga beras dengan beban bunga. Bank Garansi diteliti kebenarannya oleh Divisi Pembiayaan. Setelah adanya konfirmasi kebenaran Bank Garansi, Divisi Penyaluran beras membuat Prinlog.

- 7) Bank Garansi disimpan di Divisi Pembiayaan, apabila sampai tanggal yang telah ditentukan dalam PJB pihak pembeli tidak menyelesaikan pembayaran harga beras dan Bulog tidak memperpanjang berlakunya PJB, maka pihak Bulog segera menyurati Bank Penjamin untuk mencairkan Bank Garansi.
- 8) Apabila seluruh isi PJB telah dilaksanakan dan Divre telah membuat Berita Acara secara lengkap, maka Jaminan Pelaksanaan dapat dikembalikan kepada pembeli. Jaminan Pelaksanaan akan menjadi milik Bulog apabila pihak pembeli membatalkan atau tidak melaksanakan sebagian atau seluruh ketentuan yang terdapat dalam PJB.

b. Operasi Pasar Murni

Operasi Pasar Murni adalah operasi pasar yang bertujuan untuk mengendalikan harga dan inflasi. Pelaksana OP adalah pedagang/penyalur beras di wilayah kerja Divre/Subdivre dan atau Satgas Divre/Subdivre. Operasi Pasar dilaksanakan atas persetujuan Direksi Bulog berdasarkan usulan Ka Divre karena terjadi gejolak harga beras di wilayah kerja Divre setempat.

Operasi Pasar Murni dari sudut pelakunya adalah sebagai berikut :

- 1) Operasi Pasar Murni melalui Penyalur.
 - a) Berdasarkan permohonan dari penyalur/pedagang, Divre/Subdivre menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) kepada

penyalur untuk kuantum yang disetujui. Penyalur menyetor ke Rekening HPB Bulog di Kantor Cabang khusus BRI Jakarta, melalui Kantor Cabang BRI setempat, atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk.

- b) Setelah penyalur membayar SPS tersebut, berdasarkan Bukti Setor (BS) dari Bank yang telah diteliti oleh satuan kerja yang membidangi keuangan, Divre menerbitkan DO/SPPB atau Surat Perjanjian Pemberian Bantuan. Dengan dasar DO tersebut, penyalur mengambil beras ke gudang yang ditetapkan untuk selanjutnya disalurkan ke pengecer-pengecer di daerah pemasarannya.
- c) Khusus untuk Divre tertentu, atas persetujuan Direksi Bulog pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) untuk selanjutnya segera ditransfer ke KCK BRI Jakarta.

2) Operasi Pasar Murni melalui Satgas OP

- a) Satgas OP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah Kadivre/Kasubdivre.
- b) Kepala Unit/Penanggung Jawab Satgas oleh Kadivre/Kasubdivre mengajukan permohonan tertulis untuk kebutuhan penyaluran selama 7 (tujuh) hari. Permohonan harus mencantumkan kuantum dan daerah pemasaran.

- c) Setelah disetujui oleh Kadivre/Kasubdivre, maka dikeluarkan DO (dengan pembayaran terhutang) diterbitkan secara bertahap untuk maksimal kebutuhan penyaluran 2 hari.
- d) Realisasi DO tersebut harus sudah dipertanggungjawabkan dalam waktu 2x24 jam. Atas dasar pertimbangan situasi dan kondisi setempat, Kadivre/Kasubdivre dapat memberikan perpanjangan batas waktu selama-lamanya 24 jam.
- e) Beras yang sudah terjual diterbitkan SPS oleh Kadivre/Kasubdivre atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya penanggung jawab Satgas menyetorkan ke Bank dengan rekening yang telah ditentukan. Beras yang belum terjual dikembalikan ke gudang sesuai dengan prosedur pemasukan beras. Pemasukan beras tersebut sebagai bagian dari pemasukan beras. Pemasukan beras tersebut sebagai bagian dari pelunasan hutang Satgas. Untuk pengamanan, uang hasil penjualan beras yang belum disetorkan ke Bank harus disimpan di kas Divre/Subdivre.
- f) Pada akhir pelaksanaan tugas, Kepala Unit atau Penanggung Jawab Satgas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang dengan dilampiri bukti setor dan atau bukti pemasukan beras yang tidak terjual.

2. Operasi Pasar dilihat dari sasaran Khususnya

a. Operasi Pasar Khusus I

Merupakan operasi pasar yang bertujuan membantu masyarakat di daerah tertentu yang rawan daya beli dan oleh sebab itu harga penjualan beras disesuaikan dengan daya beli masyarakat setempat dan dilaksanakan oleh Stgas OP Divre/Subdivre.

Prosedur penyalurannya adalah sebagai berikut :

- 1) Operasi Pasar Khusus I dilaksanakan atas persetujuan Direksi Bulog berdasarkan permintaan tertulis dari Gubernur, permintaan tersebut dapat dilakukan secara langsung ke Direksi atau melalui Kadivre dengan menyebutkan secara jelas dan terinci daerah, harga dan kuantum yang dibutuhkan.
- 2) Setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bulog, Kadivre menerbitkan Surat Perintah pembentukan Satgas OP Khusus I dan selanjutnya melaksanakan OP Khusus I dengan menerbitkan DO.
- 3) Atas dasar DO yang telah diterbitkan satuan kerja yang membidangi akuntansi membukukan sebagai Piutang Stgas OP Khusus I.
- 4) Berdasarkan Berita Acara pelaksanaan OP Khusus I yang telah ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat, diterbitkan SPS kepada Stgas. Bukti setor yang diterima oleh Stgas diserahkan kepada satuan kerja yang membidangi

akuntansi untuk dicatat sebagai pengurangan piutang Stgas OP Khusus I. Sisa beras yang tidak terjual dikembalikan ke gudang sesuai prosedur pemasukan beras di gudang dan dicatat sebagai pengurangan piutang oleh satuan kerja yang membidangi akuntansi.

5) Dolog mendebet-notakan ke Bulog selisih HPB untuk OP Khusus I dengan harga buku beras untuk diselesaikan dengan Departemen Keuangan.

6) Untuk penyelesaian penagihan selisih HPB OP Khusus I dengan harga buku beras tersebut, harus dilengkapi dengan rekapitulasi berita acara pelaksanaan OP Khusus I yang ditandatangani oleh Pemda setempat. Divre mengirimkan rekapitulasi BA pelaksanaan OP Khusus I tersebut ke Divisi Penyaluran (asli) dan tembusan dikirim ke Divisi Pembiayaan dan Divisi Akuntansi.

b. Operasi Pasar Khusus II

Adalah operasi pasar yang bertujuan membantu masyarakat di daerah tertentu yang sangat lemah daya beli dan oleh sebab itu diberikan secara cuma-cuma. Pelaksanaannya dilakukan oleh Satgas OP Divre atau Subdivre bekerjasama dengan aparat-aparat Pemerintah setempat.

Prosedur penyalurannya sebagai berikut :

- 1) Operasi Pasar Khusus II dilaksanakan atas persetujuan Direksi Bulog berdasarkan permintaan tertulis dari Gubernur. Permintaan tersebut dapat dilakukan secara langsung ke Direksi Bulog atau melalui Kadivreg dengan menyebutkan secara jelas dan terinci daerah, kuantum dan jumlah penduduk serta alasan yang mendukung.
- 2) Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi Bulog, Kadivreg menerbitkan Surat Perintah pembentukan Satgas OP Khusus II dan selanjutnya melaksanakan OP Khusus II dengan menerbitkan DO.
- 3) Atas dasar DO yang telah diterbitkan satuan kerja yang membidangi akuntansi membukukan sebagai piutang OP Khusus II. Sisa beras yang tidak tersalurkan dikembalikan ke gudang sesuai prosedur pemasukan beras di gudang dan dicatat sebagai pengurangan piutang oleh satuan kerja yang membidangi akuntansi.
- 4) Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan OP Khusus II yang ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat, Divreg mendebet-notakan ke Bulog harga beras untuk OP Khusus II tersebut sebesar jumlah kuantum yang disalurkan dikalikan dengan harga buku beras untuk diselesaikan dengan Departemen Keuangan.

5) Penyelesaian penagihan harga beras untuk keperluan OP Khusus II, harus dilengkapi dengan rekapitulasi berita acara pelaksanaan OP Khusus II yang ditandatangani oleh Pemda setempat. Divre mengirimkan rekapitulasi BA pelaksanaan OP Khusus tersebut ke Divisi Penyaluran (asli) dan tembusan dikirim ke Divisi Pembiayaan dan Divisi Akuntansi.

Dengan penerapan strategi Operasi pasar murni tersebut di Kabupaten demak diharapkan dapat mengantisipasi kenaikan harga beras dan memaksimalkan stok bibit padi sebagai penunjang kualitas dan kuantitas padi yang dihasilkan. Selain itu ketersediaan jenis pupuk yang sesuai juga sangat dibutuhkan. Yang dilakukan Bulog harus mampu membuat masyarakat tidak kapok menerima beras terutama Raskin. Dalam keseharian pun Bulog juga harus mampu menurunkan harga beras apabila terjadi kenaikan yang relative tinggi. Diharapkan evaluasi yang dilakukan dapat mengawasi strategi dan distribusi yang dilakukan Bulog serta masyarakat Kabupaten Demak pada khususnya, sehingga tidak terjadi lonjakan tinggi dari harga beras di pasaran dan penerima Raskin pun puas karena beras yang diterima berkualitas baik.

Operasi pasar yang diadakan di Kabupaten Demak Pada bulan Januari 2007, harga beras kualitas medium jenis IR 64 yang biasanya Rp 3.700/kg, di pasaran harganya mencapai Rp 5.700/Kg, kemudian pada tanggal 24 Januari 2007 diadakan operasi pasar dan berakhir pada tanggal 15 Maret 2007, pada akhir operasi pasar harga beras turun menjadi

Rp3.900/Kg. Harga beras bisa turun setelah Gudang Bulog menyalurkan beras sebanyak 650 ton untuk 14 kecamatan. Harga Rp 3.900/Kg dianggap tidak terlalu tinggi ditambah nantinya harga akan turun sendiri, karena pada bulan Maret-April 2007 mulai panen raya.

4.1.3.2 Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin)

Penyaluran raskin sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi raskin mulai tahun 2002, raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (*social safety net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan raskin menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan raskin.

Penentuan kriteria penerima manfaat raskin seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin.

Sampai dengan tahun 2006, data penerima manfaat raskin masih menggunakan data dari BKKBN yaitu data keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Belum seluruh KK Miskin dapat dijangkau oleh raskin. Hal inilah yang menjadikan raskin

sering dianggap tidak tepat sasaran, karena rumah tangga sasaran berbagi dengan KK Miskin lain yang belum terdaftar sebagai sasaran. Mulai tahun 2007, digunakan data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS sebagai data dasar dalam pelaksanaan raskin.

Raskin bukan hanya telah membantu rumah tangga miskin dalam memperkuat ketahanan pangannya, namun juga sekaligus menjaga stabilitas harga. Raskin telah mengurangi permintaan beras ke pasar. Dampak raskin terhadap stabilisasi harga terlihat pada saat raskin hanya diberikan kurang dari 12 bulan (seperti pada tahun 2006 = 11 bulan dan tahun 2007 = 10 bulan). Harga beras akhir tahun 2006 dan awal 2007 serta akhir tahun 2007 dan awal 2008 meningkat tajam (http://bulog.co.id/sekilasraskin_v2.php).

4.1.4 Hasil Wawancara dengan Pimpinan dan Karyawan Perum Bulog Sub Divre I Semarang Tentang Pertanian di Kabupaten Demak

Pada wawancara yang dilakukan kepada Pimpinan dan Karyawan Perum Bulog, diperoleh hasil bahwa kualitas dan kuantitas gabah/beras salah satunya dipengaruhi oleh pendidikan petani, jumlah petani, dan kemampuan lahan. Untuk masalah pendidikan petani di Kabupaten Demak dinilai masih rendah, karena biasanya hanya lulusan SMA atau sederajat, bahkan ada juga yang lebih rendah. Akan tetapi keterampilan para petani tersebut dalam mengelola lahan pertanian pada khususnya tentang produksi beras/gabah sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil panen mereka yang bila dalam kondisi cuaca normal, hasil panen petani

mempunyai kualitas yang baik dan kuantitas yang besar, yang juga didukung luasnya lahan persawahan dan banyaknya tempat penggilingan padi yang ada di Kabupaten Demak.

Meninjau harga beras yang terjadi pada sekitar akhir tahun 2009 dan tahun 2010 ini pihak Bulog menilai harga beras relatif tinggi. Terkait dengan hal tersebut, pihak Bulog menyadari bahwa harga yang tinggi terjadi karena beberapa faktor, pertama, meningkatnya biaya produksi beras itu sendiri. Kenaikan yang terjadi tersebut dinilai masih dalam batas kewajaran dan masih bisa dijangkau oleh masyarakat.

Kedua, kondisi cuaca atau iklim yang tidak bersahabat bagi petani, karena dengan curah hujan tinggi mengakibatkan meningkatnya serangan hama wereng dan tikus, serta beberapa area pertanian di Demak mengalami banjir, seperti di daerah Kecamatan Kebonagung, Dempet dan Karangawen, mengakibatkan 872 hektar tanaman padi rusak ringan, sedang, berat dan puso. Sedangkan total lahan yang terendam sebanyak 601 hektar. Tanaman padi yang terendam mengakibatkan meningkatnya kadar air (KA) gabah tinggi yang dapat mengakibatkan KA beras hasil giling ikut tinggi yang mengakibatkan daya tahan simpan menjadi berkurang, dapat pula ketika di giling beras menjadi remuk dan visualnya kurang bagus. (<http://sigapbencana-bansos.info/>)

Ketiga, pemakaian pupuk yang dianggap praktis yakni pupuk urea, pupuk urea dianggap lebih praktis karena mudah dibawa, lebih praktis penggunaannya. Padahal kalau hanya mengandalkan pupuk urea dalam

pemupukan akan menghasilkan bulir padi yang kurang berisi, batang dan akar yang lemah, yang mengakibatkan tanaman padi mudah roboh kalau terkena angin kencang dan hujan deras. Hasilnya gabah atau beras yang dihasilkan mudah patah dan menjadi menir, serta warna berasnya kusam. Kualitas dan kuantitas gabah/beras mempengaruhi harga jualnya. Ketika kualitas beras yang baik semakin sedikit kuantitasnya, akan semakin mahal beras tersebut. (<http://www.suaramerdeka.com>)

Keempat, Harga pembelian Pemerintah (HPP) berdasarkan INPRES No. 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan, harga gabah dan harga beras mengalami kenaikan dari Rp3.040,00/Kg menjadi Rp 3.345,00/Kg untuk gabah, dan dari Rp 4.600,00/Kg menjadi Rp 5.060,00/Kg. Hal ini memicu petani dan pedagang untuk ikut menaikkan harga gabah dan beras mereka.

Kelima, pada bulan April 2010 beredarnya berita bahwa harga pupuk akan mengalami kenaikan serta berita tentang kenaikan harga beras dunia. Hal ini membuat petani menaikkan harga beras dan gabah mereka sebagai langkah antisipasi.

Keenam, mendekati tibanya Hari Raya Idul Fitri, permintaan bahan pokok mengalami peningkatan akan tetapi yang ditawarkan atau stoknya tetap, hal ini menyebabkan meningkatnya harga.

Kenaikan harga beras/gabah yang terjadi dapat menimbulkan dampak pada masyarakat khususnya dampak sosial. Dampak sosial dari naiknya harga beras/gabah di Kabupaten Demak yaitu masyarakat lebih

cenderung memilih beras yang memiliki kualitas lebih rendah dari yang biasa mereka konsumsi.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan dalam pengendalian harga beras di Kabupaten Demak yaitu Pemerintah Kabupaten Demak dan Perum Bulog. Kedua pihak yang terlibat tersebut harus mampu melaksanakan pengawasan yang teliti dan teratur. Karena apabila pengawasan yang dilakukan tidak teliti dan teratur akan mengakibatkan gagalnya pelaksanaan strategi pengendalian harga beras.

Kenaikan harga beras di Kabupaten Demak pada tahun 2010 tidak serta membuat Bulog menggelar operasi pasar, karena prosedurnya OP dilaksanakan setelah menerima pengajuan OP dari Pemerintah Kabupaten Demak. Bulog sendiri tidak menerima pengajuan tersebut karena Pemda Demak sendiri menganggap OP diperlukan jika harga beras mengalami kenaikan sebesar 25% dari harga beras normal dan kenaikan tersebut telah berjalan selama 3 bulan berturut-turut, dan di Kabupaten Demak tidak mengalami kenaikan sebesar itu. (<http://www.wawasandigital.com>)

Kendala dalam pelaksanaan OP lebih sering mengarah keproses dalam pelaksanaan jual belinya. Operasi pasar beras yang digelar biasanya dilaksanakan di pasar-pasar tradisional setempat dan banyak orang yang mengerubungi satgas operasi pasar, hal tersebut menyebabkan kesemrawutan dalam pelayanan penjualan beras, karena para pembeli merasa dirinya yang harus dilayani lebih dulu, tidak bisa antri.

Jumlah pembelian beras berkelipatan tiga, 5 Kg, 10 Kg, dan maksimal 15 Kg dengan harga perkilogramnya Rp 3.700. Dengan melakukan penjualan beras secara eceran, satgas Bulog harus menyediakan bungkusan beras seberat 5 Kg terlebih dahulu sebelum OP mulai dilaksanakan. Karena bila membungkus pada saat pembeli minta akan memakan waktu. Satgas raskin juga harus menyediakan pecahan uang kecil, dikarenakan kebanyakan pembeli tidak melakukan pembayaran dengan uang pas. Penilaian keberhasilan operasi pasar dengan cara menurunkan satgas ke pasar-pasar untuk melakukan pengecekan harga beras serta bekerja sama dengan LSM.

Dalam membantu masyarakat terkait mahalnya harga beras, raskin dalam bulan Agustus terjadi 2 kali, tujuannya membantu masyarakat dalam menyambut bulan Hari Raya Idul Fitri yang dipastikan kebutuhan bahan pokok masyarakat akan mengalami peningkatan.

Raskin dilaksanakan setelah bidang perekonomian melakukan pengajuan penyaluran raskin ke Bupati Demak kemudian setelah disetujui baru melakukan pengajuan ke Perum Bulog. Pengambilan Raskin ke Bulog dilakukan oleh perwalian tiap desa oleh satgas kelurahan tiap kecamatan dengan syarat lunas pembayaran alokasi raskin pada bulan sebelumnya dan pelunasan pembayaran alokasi raskin bulan ini maksimal 7 hari setelah pengambilan raskin. Syarat tersebut membuat terjadinya pengambilan raskin yang belum lunas pembayaran pada bulan ini dan desa tersebut tidak melunasi pembayarannya sebelum 7 hari batas maksimal

pelunasan setelah pengambilan raskin. Satgas kelurahan mempunyai kebiasaan setiap pengambilan raskin melakukan pembayaran untuk bulan sebelumnya tidak dengan sistem lunas ambil (*cash and carry*). Hal ini menyebabkan pada akhir tahun yakni bulan Desember yang harus dilakukannya pembukuan dan semuanya harus lunas tapi terkendala belum lunasnya pembayaran raskin.

Sebelum pelaksanaan penyaluran raskin Perum Bulog melakukan persiapan dengan mengecek dan menjaga kualitas beras yang akan disalurkan dengan melakukan spraying dengan anti hama serta melakukan fumigasi setiap 2x setahun. Fumigasi merupakan proses yang dilakukan dengan menutup tumpukan beras dengan plastic kemudian diberi gas selama 1 minggu. Penyaluran raskin pada awalnya setiap rumah tangga miskin (RTM) mendapatkan jatah beras seberat 15 kg dengan karung beras ukuran 15 kg, jadi setiap karung untuk 1 RTM. Kemudian terjadi perubahan setiap rumah tangganya mendapatkan jatah beras seberat 13kg. Perubahan ini menjadikan kendala para karyawan gudang Bulog mengalami hal yang tidak biasa, yang biasanya 15 kg menjadi 13 kg. Mereka harus membuat model administrasi yang berbeda seperti biasanya. Dalam administrasi sebelum terjadi perubahan jatah beras, jumlah beras yang diterima setiap RTM 15 Kg sama dengan ukuran karung karung beras yang disalurkan. Maka dengan adanya perubahan jatah beras akan ada karung beras maka akan ada karung beras yang isinya kurang dari 15 Kg tiap desa. Hal ini membuat mereka harus lebih teliti dalam membuat

administrasi dan penyediaan beras yang akan disalurkan, karena bila kurang teliti akan terjadi perbedaan antara administrasi dengan jumlah stok yang ada di gudang (fisik) dan bila jumlah stok lebih kecil daripada di administrasi, mereka yang harus mengganti dengan biaya sendiri.

Transportasi penyaluran raskin menggunakan kendaraan truk yang disediakan oleh Bulog. Transportasi tersebut disediakan melalui kerjasama antara Bulog dan penyedia jasa transportasi. Jumlah kendaraan yang ada sekitar 15 s/d 20 truk yang tiap hari tidak sama jumlahnya, jumlah tersebut kurang sebanding dengan jumlah desa tiap kecamatan, tiap harinya Bulog menyalurkan beras raskin untuk 2 kecamatan yang seluruhnya berjumlah 14 kecamatan, rata-rata tiap kecamatannya berjumlah sekitar 15-an desa. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan sampainya raskin ke tempat tujuan bagi desa yang memiliki antrian belakang, karena harus menunggu kembalinya kendaraan ke gudang Bulog setelah mengirim beras ke desa yang antri lebih awal. Keterlambatan akan diperparah bila turun hujan karena ketika terjadi hujan, kegiatan bongkar muatan truk lebih lama, harus lebih hati-hati agar beras tidak basah, dalam situasi tertentu bongkar muatan harus menunggu hujan reda terlebih dahulu, seperti jarak antara posisi truk dan tempat meletakkan bongkaran beras yang jauh.

4.1.5 Hasil Wawancara dengan Petani di Kabupaten Demak

Petani di Kabupaten demak menyatakan bahwa pada tahun 2010 mereka mengalami gagal panen atau kerugian yang besar dari tahun-tahun

sebelumnya. Kerugiannya dikarenakan kualitas dan kuantitas hasil panen mereka berkurang tidak seperti panen-panen pada tahun lalu. Penurunan kualitas dan kuantitas disebabkan karena kondisi cuaca yang ekstrim yang berupa sering turun hujan deras, angin kencang, banjir yang membuat padi mereka terendam, serangan hama wereng, tidak ada panas yang cukup untuk menjemur gabah mereka.

Dampak dari keadaan itu banyak tanaman padi yang rubuh karena terendam air dan terkena hantaman angin kencang, gabah tidak ada isinya walaupun ada tidak bagus karena serangan wereng. Gabah tidak bisa sampai kering penjemuran karena sering hujan dan mendung. Gabah walau dalam keadaan kurang kering harus tetap digiling karena kalau menunggu kering bisa menunggu beberapa hari yang bisa menyebabkan gabah timbul jamur. Beras yang dihasilkan tidak bagus karena patah bila tidak patah berasnya kusam atau kurang bersih menggilingnya, hal itu dilakukan untuk mengurangi resiko beras patah.

4.1.6 Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Demak

Masyarakat Kabupaten Demak merasa keberatan dengan naiknya harga beras, karena mereka hidup sudah pas-pasan, pengeluaran bertambah tetapi pemasukan tetap yang menuntut mereka agar bisa menyasati keadaan tersebut.

Masyarakat menganggap kebijakan Perum Bulog dalam mengatasi kenaikan harga dengan penyaluran raskin dan operasi pasar sudah tepat. Karena dengan menambah pasokan atau penawan beras dan saingan di

pasar bisa mengurangi permintaan akan beras di pedagang yang menyebabkan beras mereka tidak laku yang akan mereka siasati dengan menurunkan harga beras biar laku beras mereka.

Dengan adanya kebijakan penyaluran raskin dan operasi pasar menurut masyarakat, harga beras mengalami penurunan setelah tibanya saat penyaluran raskin dan digelarnya operasi pasar selama beberapa minggu.

4.1.7 Kondisi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Demak bermata pencaharian sebagai petani yang dalam kesehariannya melakukan kegiatan pertanian terutama dalam penanaman padi di sawah.. Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, sebagian besar wilayah Kabupaten Demak terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 50.360 ha (56,12 persen), dan selebihnya adalah lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan teknis 36,53 persen dan tadah hujan (34,58 persen), dan setengah teknis 15,62 persen. Sedangkan untuk lahan kering 35,40 persen digunakan untuk tegal/kebun, 29,20 persen digunakan untuk bangunan dan halaman, serta 18,14 persen digunakan untuk tambak. Luas lahan pertanian di Kabupaten Demak seluas 50.360 ha yang bila dipanen memperoleh gabah sebanyak 536 ribu ton.(Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, 2010 : 2).

Sarana dan prasarana penunjang produksi beras di Kabupaten Demak terbilang baik, hal ini dilihat dari luasnya lahan pertanian seluas 50.360 ha, banyaknya penduduk yang tergolong usia produktif (15-64

tahun) sebanyak 691.358 orang, sarana transportasi berlimpah, jalan-jalan desa yang di betonisasi, traktor sebanyak 1.663 unit, pemberantas jasad pengganggu sebanyak 36615 unit, perontok padi sebanyak 14.109 unit, pembersih gabah 94 unit, penyosoh beras 657 unit, penggilingan padi 322 unit. Bila sarana dan prasarana tersebut tidak baik, tidak mungkin hasil panen gabahnya berlimpah dan tidak akan menjadikan Kabupaten Demak sebagai salah satu pemproduksi gabah terbesar di Indonesia.

Kondisi ideal yang dapat mendukung produksi padi adalah daerah yang berhawa panas dan banyak mengandung uap air dengan curah hujan yang baik rata-rata 200 mm per bulan atau lebih dengan distribusi selama 4 bulan, curah hujan yang dikehendaki per tahun sekitar 1500 sampai 2000 mm. Sedangkan suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah berkisar antara 0-1500 m. Selain cuaca, tanah juga berpengaruh untuk pertumbuhan tanaman padi. Tanah yang cocok adalah tanah sawah yang memiliki kandungan pasir, debu dan lempung dalam perbandingan tertentu dengan air dalam jumlah yang cukup. Dengan demikian padi dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang ketebalan lapisan atasnya antara 18-22 cm dengan Ph antara 4-7.

4.1.7 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kenaikan Harga Beras di Kabupaten Demak

4.1.7.1 Kuantitas dan Kualitas Beras

Semakin baik kualitas beras, maka akan semakin tinggi harga beras tersebut. Semakin sedikit jumlah stok beras yang ada di pasaran, maka

harga beras tersebut akan semakin tinggi. Kuantitas beras secara keseluruhan baik kualitas rendah atau kualitas baik jumlahnya menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas beras sebagai berikut :

a. Cuaca/Iklim

Musim tanam (MT) padi I dan II memperoleh hasil yang tidak maksimal. Hal tersebut diakibatkan perubahan cuaca. Perubahan cuaca tersebut mengakibatkan serangan hama wereng, tikus serta terendamnya sejumlah lahan pertanian. Hal tersebut mengakibatkan 872 hektar tanaman padi rusak ringan, sedang, berat dan puso. Sedangkan total lahan yang terendam sebanyak 601 hektar. Wilayah yang terendam meliputi Kecamatan Kebonagung, Dempet dan Karangawen.

Tanaman padi yang terendam mengakibatkan petani melakukan panen awal dari waktu yang seharusnya. Hal tersebut dikarenakan bila terlalu lama terendam, tanaman padi akan roboh dan mengakibatkan busuk. Tanaman padi yang terendam menyebabkan kadar air (KA) gabah tinggi, serta kondisi lingkungan yang sering hujan mendung mengakibatkan masa jemur gabah berkurang. Gabah yang dalam keadaan basah bila disimpan dapat menjamur dan gabah yang memiliki KA tinggi bila digiling bisa menyebabkan butir padi patah.

Dengan semakin banyaknya petani yang mengalami kerusakan pada lahan pertaniannya mengakibatkan beras yang beredar di pasaran memiliki kualitas dan kuantitas yang lebih rendah dari masa panen yang

sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan semakin tingginya harga beras yang layak konsumsi.

b. Pupuk

Banyak petani di Kabupaten Demak yang selalu menggunakan pupuk anorganik(urea) daripada pupuk organik atau pemupukan berimbang, dengan alasan pemupukan anorganik lebih murah, lebih praktis. Padahal kalau hanya mengandalkan pupuk urea dalam pemupukan akan menghasilkan bulir padi yang kurang berisi, batang dan akar yang lemah, yang mengakibatkan tanaman padi mudah roboh kalau terkena angin kencang dan hujan deras. Hasilnya gabah atau beras yang dihasilkan mudah patah dan menjadi menir, serta warna berasnya kusam. Dengan demikian beras dengan kualitas medium keatas jumlahnya menjadi berkurang atau langka membuat harga beras mengalami kenaikan.

4.1.7.2 Psikologis

a. Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

Berdasarkan INPRES No.7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan, harga gabah dan harga beras mengalami kenaikan dari Rp3.040,00/Kg menjadi Rp 3.345,00/Kg untuk gabah, dan dari Rp 4.600,00/Kg menjadi Rp 5.060,00/Kg untuk beras. Hal ini membuat para petani, pedagang menaikkan harga jual gabah/beras mereka.

b. Terlambatnya Penyaluran Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin)

Beras raskin atau beras bersubsidi dari pemerintah yang penyalurannya biasanya pada minggu pertama tapi disalurkan pada minggu terakhir. Yang biasanya pada minggu pertama masyarakat memanfaatkan beras raskin untuk konsumsi, masyarakat harus membeli beras yang tidak bersubsidi. Pedagang berpikir, selagi beras raskin belum disalurkan permintaan beras meningkat, pedagang menaikkan harga beras karena bila beras raskin disalurkan permintaan beras akan turun.

c. Spekulasi Kenaikan Harga

Pada awal tahun 2010 petani berspekulasi pada bulan April 2010 diperkirakan harga pupuk akan mengalami kenaikan. Pedagang juga terpengaruh dengan gencarnya berita tentang kenaikan harga beras dunia. Hal ini menyebabkan beberapa pedagang menahan stok mereka yang berakibat jumlah pasokan beras di pasaran menjadi berkurang.

d. Ramadhan

Menjelang tibanya hari raya Idul Fitri, permintaan bahan pokok khususnya beras mengalami peningkatan dengan stok yang tetap, dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan beras, para pedagang berkesempatan menaikkan harga beras, untuk meraih keuntungan yang lebih besar dari hari-hari biasa

e. Bertambahnya Biaya Produksi

Biaya produksi yang mengalami kenaikan secara menonjol adalah dari sektor transportasi pengusaha penggilingan gabah. Karena

dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah, curah hujan tinggi, pengusaha penggilingan kesulitan mencari gabah dengan kualitas baik dari daerah sendiri. Kondisi ini memaksa mereka untuk mencari gabah sampai keluar kota, yang membuat biaya transportasi akan semakin mahal.

4.1.8 Langkah-Langkah Yang Ditempuh Bulog Dalam Mengatasi Kenaikan Harga Beras di Kabupaten Demak

4.1.8.1 Operasi Pasar (OP)

Strategi Bulog dalam mengatasi kenaikan harga adalah dengan menggelar OP dengan maksud menambah jumlah beras yang ditawarkan masyarakat. Akan tetapi pada tahun 2010 ini Bulog tidak menggelar OP seperti di daerah Jakarta yang diakibatkan naiknya harga beras, Kabupaten Demak tidak ada OP dikarenakan Pemda sendiri bercacuan bahwa OP akan diajukan ke Bulog setelah harga beras mengalami kenaikan sebesar 25% dan telah berlangsung selama 3 bulan, dan hal tersebut tidak terjadi sepanjang tahun 2010 ini. . Karena kenaikan harga beras belum mencapai 25%. Angka 25% diambil karena dibawah angka tersebut dianggap kenaikan yang masih wajar dan masih dapat dijangkau oleh masyarakat walaupun terasa agak berat. Serta menunggu 3 bulan karena berasumsi siapa tahu kenaikan hanya sementara.

4.1.8.2 Raskin

Raskin bukan hanya telah membantu rumah tangga miskin dalam memperkuat ketahanan pangannya, namun juga sekaligus menjaga stabilitas harga. Raskin telah mengurangi permintaan beras ke pasar. Karena setiap bulannya di Kabupaten Demak disalurkan sekitar 1.688 ton beras.

Dampak raskin terhadap stabilisasi harga terlihat pada saat raskin hanya diberikan kurang dari 12 bulan (seperti pada tahun 2006 = 11 bulan dan tahun 2007 = 10 bulan). Harga beras akhir tahun 2006 dan awal 2007 serta akhir tahun 2007 dan awal 2008 meningkat tajam. Semenjak itu raskin rutin di gelar 12 kali selama 1 tahun.

4.1.10 Efektivitas Langkah-Langkah Yang Ditempuh Bulog Mengatasi Kenaikan Harga Beras di Kabupaten Demak

4.1.9.1 Operasi Pasar

Operasi pasar yang bertujuan untuk menurunkan harga beras, pada tahun 2010 ini di Kabupaten Demak tidak perlu diadakan. Hal ini berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang menyatakan bahwa operasi pasar dapat dilaksanakan bila harga beras mengalami kenaikan sebesar 25% dan telah berlangsung selama 3 bulan.

Operasi pasar bila dijalankan merupakan strategi sangat efektif untuk menurunkan harga beras. Hal ini sudah terbukti pada operasi pasar terakhir yang digelar Bulog di Kabupaten Demak pada tahun 2007. Pada bulan Januari 2007, harga beras kualitas medium jenis IR 64 yang biasanya Rp 3.700/kg, di pasaran harganya mencapai Rp 5.700/Kg, kemudian pada tanggal 24 Januari 2007 diadakan operasi pasar dan berakhir pada tanggal 15 Maret 2007, pada akhir operasi pasar harga beras turun menjadi Rp3.900/Kg. Harga beras bisa turun setelah Gudang Bulog menyalurkan beras sebanyak 650 ton untuk 14 kecamatan. Harga Rp 3.900/Kg dianggap tidak terlalu tinggi ditambah nantinya harga akan turun sendiri, karena pada bulan Maret-April 2007 mulai panen raya.

4.1.9.2 Raskin

Penyaluran raskin secara tidak langsung ikut berperan dalam menjaga stabilitas harga beras. Hal ini terlihat pada saat raskin hanya diberikan kurang dari 12 bulan (seperti pada tahun 2006 = 11 bulan dan tahun 2007 = 10 bulan). Harga beras akhir tahun 2006 dan awal 2007 serta akhir tahun 2007 dan awal 2008 meningkat tajam. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini penyaluran raskin rutin dilakukan sebulan sekali selama 1 tahun.

Penyaluran raskin dapat ikut berperan dalam pengendalian harga beras karena pada tiap bulannya di Kabupaten Demak setiap bulannya disalurkan sekitar 1.688 ton beras dengan harga Rp1.600/Kg. Dengan adanya penyaluran raskin, pedagang berusaha untuk menarik pembeli dari masyarakat yang mendapat jatah raskin dengan tidak akan terlalu tinggi menaikkan harga beras mereka. Hal ini juga disadari masyarakat dengan pernyataan kalau tidak ada raskin pasti harga beras akan meningkat lebih mahal dari sekarang.

4.1.10 Kendala Bulog Dalam Mengatasi Kenaikan Harga Beras di Kabupaten Demak

4.1.10.1 Operasi Pasar

Operasi pasar akan dilaksanakan setelah ada permintaan dari Pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah Kabupaten Demak berpatokan akan mengajukan dilaksanakannya operasi pasar ke Bulog

setelah harga beras di pasaran mengalami kenaikan minimal sebesar 25% dan telah berlangsung selama 3 bulan.

Kendala dalam pelaksanaan OP lebih sering mengarah keproses dalam pelaksanaan jual belinya. Operasi pasar beras yang digelar biasanya dilaksanakan di pasar-pasar tradisional setempat dan banyak orang yang mengerubungi satgas operasi pasar, hal tersebut menyebabkan kesemprawutan dalam pelayanan penjualan beras, karena para pembeli merasa dirinya yang harus dilayani lebih dulu, tidak bisa antri.

Jumlah pembelian beras berkelipatan tiga, 5 Kg, 10 Kg, dan maksimal 15 Kg dengan harga perkilogramnya Rp 3.700. Dengan melakukan penjualan beras secara eceran, satgas Bulog harus menyediakan bungkusan beras seberat 5 Kg terlebih dahulu sebelum OP mulai dilaksanakan. Karena bila membungkus pada saat pembeli minta akan memakan waktu. Satgas raskin juga harus menyediakan pecahan uang kecil, dikarenakan kebanyakan pembeli tidak melakukan pembayaran dengan uang pas.

4.1.10.2 Raskin

Penyaluran raskin pada awalnya setiap rumah tangga miskin (RTM) mendapatkan jatah beras seberat 15 kg dengan karung beras ukuran 15 kg, jadi setiap karung untuk 1 RTM. Kemudian terjadi perubahan setiap rumah tangganya mendapatkan jatah beras seberat 13kg. Perubahan ini membuat para karyawan gudang Bulog mengalami hal yang tidak biasa, yang biasanya 15 kg menjadi 13 kg. Mereka harus membuat

model administrasi yang berbeda seperti biasanya. Dalam administrasi sebelum terjadi perubahan jatah beras, administrasi stok beras berdasarkan jumlah karung beras dikalikan berat karung beras tersebut (15 Kg). Maka dengan adanya perubahan jatah beras akan ada karung beras maka akan ada karung beras yang isinya kurang dari 15 kg. Hal ini membuat mereka harus lebih teliti dalam membuat administrasi, karena bila kurang teliti akan terjadi perbedaan antara administrasi dengan jumlah stok yang ada di gudang (fisik).

Pengambilan raskin ke Bulog dilakukan oleh perwalian tiap desa oleh satgas kelurahan tiap kecamatan dengan syarat lunas pembayaran alokasi raskin pada bulan sebelumnya dan pelunasan pembayaran alokasi raskin bulan ini maksimal 7 hari setelah pengambilan raskin. Syarat tersebut membuat terjadinya pengambilan raskin yang belum lunas pembayaran pada bulan ini dan desa tersebut tidak melunasi pembayarannya sebelum 7 hari batas maksimal pelunasan setelah pengambilan raskin. Satgas kelurahan mempunyai kebiasaan setiap pengambilan raskin melakukan pembayaran untuk bulan sebelumnya tidak dengan sistem lunas ambil (*cash and carry*). Hal ini menyebabkan pada akhir tahun yakni bulan Desember yang harus dilakukannya pembukuan dan semuanya harus lunas tapi terkendala belum lunasnya pembayaran raskin.

Terkadang dalam 12 kali penyaluran tiap tahun, dalam salah satu penyalurannya, Pengajuan pelaksanaan penyaluran raskin oleh Pemda setempat di serahkan secara mendadak dengan hari pelaksanaan raskin. Hal

ini mengakibatkan pihak Bulog harus menyiapkan segala sesuatunya dengan waktu yang mepet. Seperti transportasi, administrasi dan stok beras.

Transportasi penyaluran raskin menggunakan kendaraan truk yang disediakan oleh Bulog. Transportasi tersebut disediakan melalui kerjasama antara Bulog dan penyedia jasa transportasi. Jumlah kendaraan yang ada sekitar 15 s/d 20 truk yang tiap hari tidak sama jumlahnya, jumlah tersebut kurang sebanding dengan jumlah desa tiap kecamatan, tiap harinya Bulog menyalurkan beras raskin untuk 2 kecamatan yang seluruhnya berjumlah 14 kecamatan, rata-rata tiap kecamatannya berjumlah sekitar 15-an desa. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan sampainya raskin ke tempat tujuan bagi desa yang memiliki antrian belakang, karena harus menunggu kembalinya kendaraan ke gudang Bulog setelah mengirim beras ke desa yang antri lebih awal. Keterlambatan akan diperparah bila turun hujan karena ketika terjadi hujan, kegiatan bongkar muatan truk lebih lama, harus lebih hati-hati agar beras tidak basah, dalam situasi tertentu bongkar muatan harus menunggu hujan reda terlebih dahulu, seperti jarak antara posisi truk dan tempat meletakkan bongkaran beras yang jauh.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Temuan Penting Terkait Dengan Penelitian Evaluasi Kinerja Perum Bulog Dalam Pengendalian Harga Beras (Studi Kasus di Kabupaten Demak)

Pada tahun 2010 di Kabupaten Demak mengalami perubahan cuaca yang mengakibatkan terjadinya hujan deras dan berdampak

terjadinya banjir di sejumlah areal pertanian pertanian dan memicu serangan hama wereng dan tikus. Area pertanian padi yang mengalami kerusakan mencapai 872 ha. Kerusakan tersebut mengakibatkan jumlah panen gabah menjadi lebih kecil dan kualitasnya menjadi lebih rendah. Kondisi tersebut mengakibatkan harga beras dengan semua kualitas mengalami peningkatan harga. Kenaikan harga diperparah dengan naiknya biaya produksi beras dari sektor transportasi karena beberapa pengusaha penggilingan padi harus mencari gabah dengan kualitas baik ke luar daerah Demak.

Kualitas tanaman padi dapat ditingkatkan dengan penggunaan pupuk organik dan dengan pemupukan berimbang. Dengan cara tersebut tanaman padi akan tidak mudah roboh bila diterpa angin dan mengalami kebanjiran, serta bulir padi akan lebih berisi dan tidak mudah patah.

Strategi Bulog dalam mengatasi dan mencegah kenaikan harga beras yang tinggi dengan melalui Operasi Pasar dan Penyaluran raskin. Operasi pasar dilakukan dengan menambah jumlah pasokan beras yang ditawarkan kemasyarakat. Akan tetapi pada tahun 2010 ini Bulog tidak menggelar OP seperti di daerah Jakarta yang diakibatkan naiknya harga beras, Kabupaten Demak tidak ada OP dikarenakan Pemda sendiri bercacuan bahwa OP akan diajukan ke Bulog setelah harga beras mengalami kenaikan sebesar 25% dan telah berlangsung selama 3 bulan, dan hal tersebut tidak terjadi sepanjang tahun 2010 ini. Karena kenaikan harga beras belum mencapai 25%. Angka 25% diambil karena dibawah

angka tersebut dianggap kenaikan yang masih wajar dan masih dapat dijangkau oleh masyarakat walaupun terasa agak berat. Serta menunggu 3 bulan karena berasumsi siapa tahu kenaikan hanya sementara. Penyaluran raskin dapat mencegah kenaikan harga beras karena setiap bulannya di Kabupaten Demak disalurkan sebesar 1.688 ton beras untuk setiap rumah tangga miskin menerima 15 Kg dengan harga 1.600/Kg.

Kurangnya peran Pemda setempat dalam membina atau mensosialisasi perangkat desa untuk melakukan pembayaran raskin pada tiap bulannya agar selalu tepat waktu agar tidak merugikan karyawan Bulog pada tiap akhir tahun karena harus menalangi setiap tutup buku akhir tahun. Hal ini juga disebabkan Bulog sendiri yang kurang tegas kepada pemda untuk membina atau mensosialisasi mengenai pembayaran raskin.

Koordinasi yang kurang baik antara pihak Bulog dengan Pemda dan Bulog dengan Jasa Transportasi menyebabkan terganggunya penyaluran raskin. Seperti ketidak tepatan waktu pembayaran raskin oleh perangkat desa, lamanya proses penyaluran raskin karena harus menunggu armada transportasi dari desa. Namun gangguan tersebut tidak sampai merubah tujuan awal dari raskin, yakni membantu rumah tangga miskin dalam memperkuat ketahanan pangannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan juga setelah penulis melakukan pembahasan mengenai strategi Bulog dalam mengantisipasi kenaikan harga beras di pasar wilayah Kabupaten Demak, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kenaikan harga beras Kabupaten Demak dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas beras yang beredar di pasaran dan psikologis pedagang. Yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas beras yaitu cuaca, penggunaan pupuk. Dan yang mempengaruhi psikologis pedagang yaitu kenaikan HPP, terlambatnya penyaluran raskin, spekulasi kenaikan harga, Ramadhan.
2. Langkah-langkah yang ditempuh Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras melalui dua cara, yaitu melalui OP dan penyaluran raskin.
3. OP dan penyaluran raskin mempunyai peran yang penting dan efektif dalam stabilitas harga beras.
4. Kendala dalam OP terjadi pada saat pelaksanaan jual beli beras karena banyaknya pembeli yang menimbulkan kesemrawutan. Sedangkan kendala dalam penyaluran raskin terletak pada kurangnya koordinasi antara Perum Bulog, Pemerintah Kabupaten Demak dan penyedia jasa

transportasi yang berakibat terlambatnya beras sampai ke penerima raskin.

5.2 Saran

Beberapa saran akan penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjaga atau mempererat koordinasi antara Bulog dengan Pemda Kabupaten Demak dan pihak penyedia jasa angkutan, agar ketika tiba penyaluran raskin dan perlunya diadakan OP, pihak Bulog bisa dengan segera menyedia beras yang dibutuhkan, dan jasa angkutan menyediakan kendaraannya
2. Diperlukannya kerjasama antara Bulog dan Pemda Kabupaten Demak untuk melakukan sosialisasi mengenai penanaman padi yang lebih baik, agar hasilnya berkualitas dan banyak jumlah panennya.
3. Bulog perlu sikap tegas kepada Pemda Kabupaten Demak dalam hal pembayaran raskin oleh perangkat-perangkat desa, karena bila pembayaran raskin selalu terlambat, akan merugikan atau membebani karyawan Bulog setiap akhir tahun.
4. Bulog perlu memberi perhatian yang lebih pada kendala-kendala dalam menjalankan OP dan penyaluran raskin, karena bagaimanapun kendala tersebut membuat repot beberapa pihak seperti karyawan Bulog sendiri, perangkat desa, penerima beras OP dan raskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Saifullah, 2001, Peran Bulog Dalam Kebijakan Perberasan Nasional, http://www.bulog.co.id/old_website/data/doc/20070321aPapBulBer.pdf, diakses tanggal 17 Juni 2010.
- Anonim, 2007, Program Peningkatan Ketahanan Pangan, http://www.deptan.go.id/daerah_new/ntt/distan_ntt/keg.apbn_files/PROGRAM%20PENINGKATAN%20KETAHANAN%20PANGAN.htm, diakses tanggal 17 Juni 2010.
- , 2008, Strategi Penetapan Harga (<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/strategi-penetapan-harga-produk-baru.html>), diakses tanggal 16 Juni 2010.
- Basu Swastha dan Irawan, 1990, *Manajemen Pemasaran Modern*, Edisi Kedua, Yogyakarta : Liberty.
- Bernadin, H. John & Joyce E.A. Russell. 1993, *Human resource management*, International edition, Singapura : McGraw Hill, Inc.
- Danim, Sudarwan. 2002. Menjad Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia
- Darmawati, Khomsyiah dan Rika Gelar R, (2005), "Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan", Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Yogyakarta, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik, Vol 8, No. 1, Januari 2005
- Dessler, Gary, 1997. *Manajemen Personalialia*. Terjemahan Agus Dharma. Jakarta : Erlangga.
- , 2000, *Management*, Prentice Hall, Inc, Upper Saddle River, New Jersey 07458
- Fandy Tjiptono. 2001. *Strategi Pemasaran*. Andi. Yogyakarta.
- Gibson, Ivansevich, and Donnelly, 1995, *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*, Jilid 2, Jakarta : Binarupa Aksara.
- Gulo W, 2002. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hadari Nawawidan Mimi Martini, 1995, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Khomsan, Ali (2008), "Rawan Pangan, Rawan Gizi", *Kompas*, Opini, Rabu, 16 Januari, halaman 6.
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Maryoto, Susilo, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mears, Leon , 1982, *Era Baru Ekonomi Perberasan Indonesia*, Yogyakarta, UGM Press
- Muhammad Farouk, 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PTIK Press & Restu
- Samhadi, Sri Hartati (2007), "Perubahan Iklim. Ketahanan Pangan Terancam", *Kompas*, Fokus Pemanasan Global, Sabtu, 1 Desember, halaman 37.
- Santoso, Singgih & Fandy Tjiptono. (2004). "Riset Pemasaran : Konsep dan Aplikasi dengan SPSS". Elex Media Computindo. Elex Media Computindo
- Sedermayanti (2000). *Tata kerja dan produktivitas kerja*, Bandung: Mandor Jaya
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Prawiro Sentono. 1999. *Manajemen Sumberdaya Manusia : Kebijakan Kinerja Karyawan*. Ed. I. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Yustika, Ahmad Erani (2008), "Masalah Ketahanan Pangan", *Kompas*, Opini, Rabu, 16 Januari, halaman 6.
- http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/Pros_Rachmat_06.pdf
- http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2918_10062008.pdf

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1**PEDOMAN WAWANCARA**

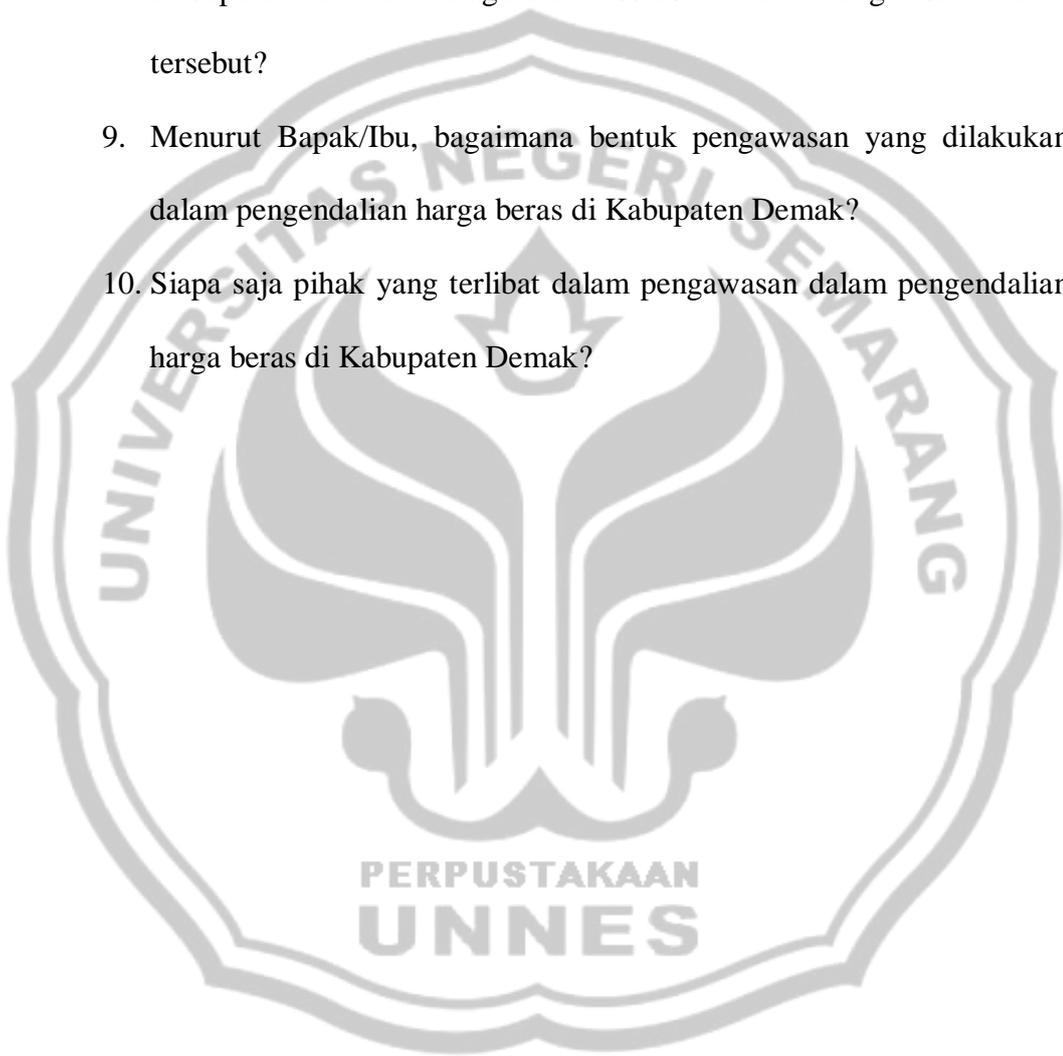
**EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM
BULOG DALAM PENGENDALIAN HARGA BERAS
(Studi Kasus di Kabupaten Demak)**

Responden(Bulog) :
Pekerjaan :
Jabatan :
Lokasi :
Pewawancara :

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kualitas dan kuantitas SDM petani di Kabupaten Demak?(pendidikan petani, kemampuan mengelola lahan, jumlah petani)
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana modal/biaya yang tersedia dan dibutuhkan untuk kegiatan pertanian (pengadaan, pengeluaran)?
Diperoleh dari mana modal tersebut?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang dapat mempengaruhi produksi beras/gabah di Kabupaten Demak? (kualitas, kuantitas)
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai harga beras yang pada bulan-bulan terakhir ini relatif tinggi?
5. Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang dapat mempengaruhi harga beras/gabah di Kabupaten Demak?
6. Menurut Bapak/Ibu, apa dampak sosial dari naiknya harga beras di Kabupaten Demak?
7. Menurut Bapak/Ibu, kebijakan apa yang telah disusun untuk mengatasi kenaikan harga beras di Kabupaten Demak? (kebijakan apa yg dibuat,

siapa saja yg terlibat, apa sasaran program, sudah/belum dilaksanakan, kapan).

8. Apa saja kendala yang dihadapi saat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian program pengendalian harga beras di Kabupaten Demak? Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut?
9. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengendalian harga beras di Kabupaten Demak?
10. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengawasan dalam pengendalian harga beras di Kabupaten Demak?



Lampiran 2

HASIL WAWANCARA

**EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM
BULOG DALAM PENGENDALIAN HARGA BERAS
(Studi Kasus di Kabupaten Demak)**

Responden(Bulog)	: Riyadi S.E
Pekerjaan	: Karyawan Perum Bulog
Jabatan	: Kepala Seksi Pelayanan Publik
Lokasi	: Sub Divre I Semarang
Pewawancara	: Yuli Triadi

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kualitas dan kuantitas SDM petani di Kabupaten Demak?(pendidikan petani, kemampuan mengelola lahan, jumlah petani)

Jawab : Untuk masalah pendidikan petani di Kabupaten Demak saya kira masih rendah, biasanya lulusan SMA atau sederajat, bahkan ada yang lebih rendah. Akan tetapi ketrampilan mereka dalam mengelola lahan pertanian khususnya produksi beras atau gabah sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari luasnya lahan persawahan dan banyaknya tempat penggilingan padi di Kabupaten Demak.

2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana modal/biaya yang tersedia dan dibutuhkan untuk kegiatan pertanian (pengadaan, pengeluaran)? Diperoleh dari mana modal tersebut?

Jawab : Modal yang tersedia untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Demak cukup untuk kegiatan pertanian. Biasanya modal diperoleh dari pinjaman pemerintah maupun bank-bank terkait yang bersedia memberikan modal kepada petani dengan bunga yang kompetitif.

3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang dapat mempengaruhi produksi beras/gabah di Kabupaten Demak? (kualitas, kuantitas)

Jawab : Hal utama yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas beras adalah cuaca. Buruknya cuaca saat ini berpengaruh besar terhadap kualitas dan kuantitas beras. Secara kualitas, hasil giling gabah tidak terlalu baik jika sering terjadi hujan, karena kadar air beras akan tinggi, hal ini akan berpengaruh pada cepat rusak serta cepat terserang hama pada beras sehingga beras akan berbau apek. Secara kuantitas, hasil panen yang diperoleh berkurang karena gagal panen.

4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai harga beras yang pada bulan-bulan terakhir ini relatif tinggi?

Jawab : Terkait mengenai naiknya harga beras pada bulan-bulan terakhir ini memang kami sadari harga yang tinggi terjadi karena

berbagai faktor. Kenaikan harga beras tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih dapat dijangkau oleh masyarakat. Pemda Demak sendiri berpedoman bahwa Pemda Demak akan mengajukan Operasi Pasar bila harga beras mencapai kenaikan sebesar 25% dan telah berjalan selama 3 bulan.

5. Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang dapat mempengaruhi harga beras/gabah di Kabupaten Demak?

Jawab : Yang dapat mempengaruhi kenaikan harga beras/gabah di Kabupaten Demak adalah kualitas dan kuantitas barang tersebut, permintaan barang tersebut, biaya produksi, spekulasi pedagang dan petani.

6. Menurut Bapak/Ibu, apa dampak sosial dari naiknya harga beras di Kabupaten Demak?

Jawab : Dampak sosial dari naiknya harga beras/gabah di Kabupaten Demak yaitu masyarakat cenderung lebih memilih beras yang memiliki kualitas yang rendah dari yang biasa mereka konsumsi.

7. Menurut Bapak/Ibu, kebijakan apa yang telah disusun untuk mengatasi kenaikan harga beras di Kabupaten Demak? (kebijakan apa yg dibuat, siapa saja yg terlibat, sudah/belum dilaksanakan, kapan).

Jawab : Kebijakan yang disusun untuk mengatasi kenaikan harga beras di Kabupaten Demak yaitu dengan diadakannya Operasi Pasar yang dilakukan oleh Perum Bulog bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Demak yang untuk saat ini tidak atau belum perlu dilaksanakan karena kenaikan harga belum mencapai 25% dan belum berjalan selama 3 bulan.

8. Apa saja kendala yang dihadapi saat pelaksanaan program pengendalian harga beras di Kabupaten Demak? Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

Jawab : Kendala yang dihadapi yaitu kurang teraturan dan kurang tertiban pembeli beras OP, ketersediaan angkutan, perubahan kuantum dari 15 Kg/KK menjadi 13 Kg/KK untuk Raskin.

9. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam pengendalian harga beras di Kabupaten Demak?

Jawab : Bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan pencatatan harga beras bekerjasama dengan Pemda Demak, menguji kualitas beras apakah sudah sesuai dengan standar kelayakan.

10. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengawasan dalam pengendalian harga beras di Kabupaten Demak?

Jawab : Pihak yang terlibat adalah Perum Bulog dan Pemda Kabupaten Demak.

Lampiran 3**PEDOMAN WAWANCARA**

**EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM
BULOG DALAM PENGENDALIAN HARGA BERAS
(Studi Kasus di Kabupaten Demak)**

Responden	:
Umur	:
Pendidikan Terakhir:	:
Pekerjaan	:
Lokasi	:
Pewawancara	:

1. Berapa luas lahan pertanian yang dimiliki ?
2. Berapa panen yang bisa dihasilkan dari luas lahan tersebut?
3. Berapa panen yang dihasilkan pada tahun 2010 ?
4. Bagaimana kualitas gabah yang dipanen dan beras yang dihasilkan?
5. Apa saja yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas gabah yang dipanen dan beras yang dihasilkan?

PERPUSTAKAAN
UNNES

Lampiran 4

HASIL WAWANCARA

**EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM
BULOG DALAM PENGENDALIAN HARGA BERAS
(Studi Kasus di Kabupaten Demak)**

Responden	:	Saripan.....
Umur	:	49 tahun.....
Pendidikan Terakhir:	:	SD.....
Pekerjaan	:	Petani.....
Lokasi	:	Jl Brambang No 53 Demak.....
Pewawancara	:	Yuli Triadi.....

1. Berapa luas lahan pertanian yang dimiliki ?
Jawab : 1,5 bahu
2. Berapa panen yang bisa dihasilkan dari luas lahan tersebut?
Jawab : kurang lebih 5 ton
3. Berapa panen yang dihasilkan pada tahun 2010 ?
Jawab : cuman sekitar 1,5 ton
4. Bagaimana kualitas gabah yang dipanen dan beras yang dihasilkan?
Jawab : gabah berkualitas jelek, kalau digiling berasnya banyak yang patah
5. Apa saja yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas gabah yang dipanen dan beras yang dihasilkan?
Jawab : cuaca yang tidak mendukung, saat masa tanam sering turun hujan deras yang berakibat padi terendam dan kabarnya gara-gara cuaca tersebut muncul serangan hama wereng. Setelah dipanen tidak ada panas yang cukup untuk menjemur gabah. Gabah yang kurang kering kalau digiling jadinya berasnya banyak yang patah

Lampiran 5



HASIL WAWANCARA

**EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM
BULOG DALAM PENGENDALIAN HARGA BERAS
(Studi Kasus di Kabupaten Demak)**

Responden	:	Bambang Muhaimin.....
Umur	:	47 tahun.....
Pendidikan Terakhir:	:	SMA.....
Pekerjaan	:	Petani.....
Lokasi	:	Jl Sultan Hadijaya No 124 Demak.....
Pewawancara	:	Yuli Triadi.....

1. Berapa luas lahan pertanian yang dimiliki ?
Jawab : 2 bahu
2. Berapa panen yang bisa dihasilkan dari luas lahan tersebut?
Jawab : sekitar 5 - 6 ton
3. Berapa panen yang dihasilkan pada tahun 2010 ?
Jawab : 2 ton
4. Bagaimana kualitas gabah yang dipanen dan beras yang dihasilkan?
Jawab : gabah kualitasnya tidak bagus, banyak gabah yang kopong atau tidak ada isinya , berasnya juga tidak bagus hasilnya, banyak menir dan kusam
5. Apa saja yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas gabah yang dipanen dan beras yang dihasilkan?
Jawab : gabah dan beras kualitasnya tidak bagus karena selama masa tanam tidak ada panas untuk menjemur gabah, sering turun hujan sampai padinya terendam alias banjir, kalau tidak hujan mendung. Gabah yang kurang kering kalau d simpan bisa menjamur, kalau di giling banyak yang patah

Lampiran 6



HASIL WAWANCARA

**EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM
BULOG DALAM PENGENDALIAN HARGA BERAS
(Studi Kasus di Kabupaten Demak)**

Responden	:	Ashadi.....
Umur	:	35 tahun.....
Pendidikan Terakhir:	:	Tidak sekolah.....
Pekerjaan	:	Petani.....
Lokasi	:	Jl. Gayang Karangrejo No. 73 Demak.....
Pewawancara	:	Yuli Triadi.....

1. Berapa luas lahan pertanian yang dimiliki ?
Jawab : 2 bahu
2. Berapa panen yang bisa dihasilkan dari luas lahan tersebut?
Jawab : kurang lebih 6 ton
3. Berapa panen yang dihasilkan pada tahun 2010 ?
Jawab : sekitar 3 ton
4. Bagaimana kualitas gabah yang dipanen dan beras yang dihasilkan?
Jawab : Gabah yang dipanen kualitasnya tidak bagus yang berakibat beras yang dihasilkan tidak bagus pula karena yang hancur dengan yang utuh banyak yang hancur berasnya
5. Apa saja yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas gabah yang dipanen dan beras yang dihasilkan?
Jawab : yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas gabah yang dihasilkan yakni cuaca yang tidak mendukung, hujan terus menerus disertai angin kencang. Ditambah serangan hama wereng yang berakibat banyak gabah yang tidak ada isinya. Hal itu terjadi gara-gara werengnya menghisap sari-sari makanan di batang padi. Waktu penjemuran gabah tidak ada panas yang cukup buat pengeringan yang memaksa gabah digiling dalam keadaan kurang kering karena bila menunggu panas yang cukup keburu berjamur gabahnya.

Lampiran 7

HASIL WAWANCARA

**EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM
BULOG DALAM PENGENDALIAN HARGA BERAS
(Studi Kasus di Kabupaten Demak)**

Responden	:	Sugianto.....
Umur	:	60 tahun.....
Pendidikan Terakhir:	:	SMA.....
Pekerjaan	:	Petani.....
Lokasi	:	Jl. Cangkring No 23 Demak.....
Pewawancara	:	Yuli Triadi.....

1. Berapa luas lahan pertanian yang dimiliki ?
Jawab : sekitar 2,5 ha
2. Berapa panen yang bisa dihasilkan dari luas lahan tersebut?
Jawab : sekitar 12 ton
3. Berapa panen yang dihasilkan pada tahun 2010 ?
Jawab : sekitar 5 ton
4. Bagaimana kualitas gabah yang dipanen dan beras yang dihasilkan?
Jawab : gabah yang dipanen kualitasnya jelek berasnya juga jelek karena berasnya tidak bersih gilingnya, masih ada sedikit kulit berasnya. Hal itu dilakukan untuk mencegah beras patah-patah
5. Apa saja yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas gabah yang dipanen dan beras yang dihasilkan?
Jawab : sering turun hujan sampai padi terendam gara-gara banjir yang berakibat beberapa batang padi ada yang patah. Tapi beruntung cuman sedikit yang sampai patah ato rubuh padinya. Jarang ada panas saat masa penjemuran gabah, saat penjemuran kadang dalam keadaan mendung dan terkadang baru setengah hari penjemuran turun hujan. Alat untuk menggiling disetel tidak terlalu bersih gabah, hal itu untuk mengurangi resiko beras mengalami patah.

Lampiran 8



HASIL WAWANCARA

EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM BULOG DALAM PENGENDALIAN HARGA BERAS (Studi Kasus di Kabupaten Demak)

Responden	:	Sukardi.....
Umur	:	53 tahun.....
Pendidikan Terakhir:	:	SMA.....
Pekerjaan	:	Petani.....
Lokasi	:	Jl. Gayang Karangrejo No. 27 Demak
Pewawancara	:	Yuli Triadi.....

1. Berapa luas lahan pertanian yang dimiliki ?
Jawab : 1,5 bahu
2. Berapa panen yang bisa dihasilkan dari luas lahan tersebut ?
Jawab : sekitar 5 ton
3. Berapa panen yang dihasilkan pada tahun 2010 ?
Jawab : cuman sekitar 1 ton
4. Bagaimana kualitas gabah yang dipanen dan beras yang dihasilkan ?
Jawab : gabah kualitasnya jelek karena kalau digiling berasnya jadi sedikit, kusam serta banyak yang patah
5. Apa saja yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas gabah yang dipanen dan beras yang dihasilkan?
Jawab : cuaca yang tidak mendukung saat masa tanam, karena saat masa tanam sering turun hujan yang mengakibatkan ladang banjir dan padinya terendam, hal tersebut memaksa gabah dipanen dalam keadaan muda, karena khawatir kalau menunggu terlalu lama gabah tambah parah rusaknya. Gabah yang dipanen dalam keadaan basah. Saat penjemuran tidak ada panas yang cukup untuk mengeringkan gabah dan hasilnya gabah menjadi patah-patah dan berwarna kusam.

Lampiran 9**PEDOMAN WAWANCARA**

**EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM
BULOG DALAM PENGENDALIAN HARGA BERAS
(Studi Kasus di Kabupaten Demak)**

Responden	:
Umur	:
Pendidikan Terakhir:	
Pekerjaan	:
Lokasi	:
Pewawancara	:

1. Apa yang bapak/ibu rasakan akibat naiknya harga beras pada tahun 2010?
2. Menurut bapak/ibu, apakah strategi Perum Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras melalui penyaluran raskin sudah tepat? Mengapa?
3. Menurut bapak/ibu, apakah strategi Perum Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras melalui operasi pasar sudah tepat? Mengapa?
4. Menurut Bapak/Ibu, adakah perubahan yang berarti yang dirasakan setelah kebijakan Perum Bulog dilaksanakan?

PERPUSTAKAAN
UNNES

Lampiran 10



HASIL WAWANCARA

**EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM
BULOG DALAM PENGENDALIAN HARGA BERAS
(Studi Kasus di Kabupaten Demak)**

Responden	:	Salamun.....
Umur	:	31 tahun.....
Pendidikan Terakhir:	:	SMA.....
Pekerjaan	:	Buruh pabrik.....
Lokasi	:	Jl Brambang No. 50 Demak.....
Pewawancara	:	Yuli Triadi.....

1. Apa yang bapak/ibu rasakan akibat naiknya harga beras pada tahun 2010?

Jawab : Hidup terasa lebih berat karena pekerjaan cuman buruh pabrik, penghasilan pas-pasan.

2. Menurut bapak/ibu, apakah strategi Perum Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras melalui penyaluran raskin sudah tepat? Mengapa?

Jawab : sudah tepat, karena dengan adanya penyaluran raskin, akan mengurangi jumlah orang belanja beras di pasar yang menyebabkan beras pedagang di pasar tidak laku karena harga yang mahal, biar laku mereka menurunkan harganya.

3. Menurut bapak/ibu, apakah strategi Perum Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras melalui operasi pasar sudah tepat? Mengapa?

Jawab : sudah tepat, karena dengan adanya operasi pasar maka pedagang beras di pasar akan saingan dengan petugas operasi pasar yang menjual harga berasnya dengan harga murah.

4. Menurut Bapak/Ibu, adakah perubahan yang berarti yang dirasakan setelah kebijakan Perum Bulog dilaksanakan?

Jawab : setelah kebijakan tersebut dijalankan yang terasa harga beras mengalami penurunan setelah beberapa minggu pelaksanaan,

Lampiran 11



HASIL WAWANCARA

EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM BULOG DALAM PENGENDALIAN HARGA BERAS (Studi Kasus di Kabupaten Demak)

Responden	:	Trubus Susilo.....
Umur	:	41 tahun.....
Pendidikan Terakhir:		SMP.....
Pekerjaan	:	Tukang becak.....
Lokasi	:	Jl Sultan Hadiwijaya No 120 Demak.....
Pewawancara	:	Yuli Triadi.....

1. Apa yang bapak/ibu rasakan akibat naiknya harga beras pada tahun 2010?

Jawab : Beban hidup terasa jadi mahal karena dengan naiknya harga beras maka harus mengurangi pengeluaran yang lain, seperti yang biasanya makan pakai sayur dan ikan, sekarang jadi sayur dan tempe.

2. Menurut bapak/ibu, apakah strategi Perum Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras melalui penyaluran raskin sudah tepat? Mengapa?

Jawab : sudah tepat, karena orang kecil yang memperoleh beras tersebut pasti tidak akan membeli beras di pasar yang harganya lebih mahal, kalau beras mereka tidak laku pasti mereka menurunkan harga biar laku

3. Menurut bapak/ibu, apakah strategi bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras melalui operasi pasar sudah tepat? Mengapa?

Jawab : sudah tepat karena kalau ada operasi pasar tersedia beras dengan harga yang murah, masyarakat pasti akan memilih beras dengan harga yang lebih murah, kalau sudah begitu beras yang dijual di pasar akan tidak laku, dengan begitu kalau pedagang akan menurunkan harga beras mereka biar laku

4. Menurut Bapak/Ibu, adakah perubahan yang berarti yang dirasakan setelah kebijakan Perum Bulog dilaksanakan?

Jawab : setelah pelaksanaan kebijakan itu, terasa kalau harga beras mulai turun dengan begitu sisa dari belanja beras mahal bisa untuk menambah lauk

Lampiran 12

HASIL WAWANCARA

**EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM
BULOG DALAM PENGENDALIAN HARGA BERAS
(Studi Kasus di Kabupaten Demak)**

Responden	:	Eko Sukirno.....
Umur	:	35 tahun.....
Pendidikan Terakhir:	:	S1.....
Pekerjaan	:	Guru SLTP.....
Lokasi	:	Jl. Gayang Karangrejo No 31 Demak.....
Pewawancara	:	Yuli Triadi.....

1. Apa yang bapak/ibu rasakan akibat naiknya harga beras pada tahun 2010?

Jawab : biasa saja, karena apapun yang dirasakan harga tidak akan turun dengan sendirinya, tapi ada rasa terbebani juga, soalnya pengeluaran bertambah tapi pemasukannya tetap, paling cuman mengurangi sisa pengeluaran yang disimpan untuk beli beras tersebut.

2. Menurut bapak/ibu, apakah strategi Perum Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras melalui penyaluran raskin sudah tepat? Mengapa?

Jawab : sudah tepat, karena bila tidak ada penyaluran raskin, harga beras akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari sekarang, soalnya masyarakat akan tergantung pada beras yang dijual di pasar yang akan meningkatkan permintaan, semakin banyak orang butuh pedang akan dengan mudah memainkan harga

3. Menurut bapak/ibu, apakah strategi Perum Bulog dalam mengatasi kenaikan harga beras melalui operasi pasar sudah tepat? Mengapa?

Jawab : sudah tepat karena dengan ada operasi pasar masyarakat pasti akan memilih beras dengan harga yang lebih murah, maka hal tersebut mengurangi permintaan beras yang ada di pasar, dengan begitu stok pedagang akan habis dalam waktu yang lebih lama yang bisa merusak beras tersebut, maka mereka akan menurunkan harga beras mereka. Apalagi operasi pasar tidak akan dihentikan sampai harga turun

4. Menurut Bapak/Ibu, adakah perubahan yang berarti yang dirasakan setelah kebijakan Perum Bulog dilaksanakan?

Jawab : setelah beberapa waktu pelaksanaan kebijakan tersebut terlihat harga beras mulai mengalami penurunan, penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh mendekatinya waktu masa panen gabah. Dengan menurunnya harga beras, memberikan kita pilihan lebih akan beras dengan kualitas dan harga yang tidak jauh berbeda

